

**ANALISIS KESIAPAN *DIGITAL GOVERNANCE* PADA PEMERINTAH
DAERAH DALAM PENGEMBANGAN *SMART PROVINCE* DI PROVINSI
LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

**RIZKI AMELIA PUTRI
NPM. 2116041021**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**ANALISIS KESIAPAN *DIGITAL GOVERNANCE* PADA PEMERINTAH
DAERAH DALAM PENGEMBANGAN *SMART PROVINCE* DI PROVINSI
LAMPUNG**

Oleh

RIZKI AMELIA PUTRI

Skripsi

**Sebagai Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS KESIAPAN *DIGITAL GOVERNANCE* PADA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN *SMART PROVINCE* DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

RIZKI AMELIA PUTRI

Pemerintah Provinsi Lampung melalui penilaian indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tahun 2023 meraih urutan ketujuh SPBE terbaik di Indonesia. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan dalam transformasi tata kelola pemerintahan digital tersebut, yang mengindikasikan kurang optimalnya kesiapan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan *digital governance* pada Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung pengembangan *smart province*. Pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami secara mendalam mengenai kesiapan Pemerintah Provinsi Lampung dalam aspek tata kelola pemerintahan digital, khususnya dalam pengembangan *smart province*. Analisis terhadap hasil temuan menggunakan analisis yang mengadaptasi teori *e-readiness framework* STOPE Al-Osaimi *et al.* (2008) melalui domain utama kesiapan pemerintahan elektronik, meliputi strategi, teknologi, organisasi, sumber daya manusia, dan lingkungan, dengan berbagai sub-domain didalamnya. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Provinsi Lampung memiliki perkembangan yang baik dalam aspek kebijakan dan regulasi, infrastruktur dasar dan penunjang TIK, kerja sama dengan berbagai *stakeholders*, serta dukungan dalam mencapai SDM digital. Tantangan besar yang dialami oleh Pemerintah Provinsi Lampung mencakup kelemahan dalam pemerataan implementasi kebijakan, koordinasi lintas sektor, kesiapan kuantitas dan kualitas SDM, interoperabilitas keseluruhan layanan elektronik, serta pemerataan infrastruktur teknologi umum. Temuan ini menunjukkan pentingnya membentuk satuan tugas dengan kolaborasi *stakeholders* khusus *smart province*, menyusun dan menetapkan arah kebijakan yang terstruktur dan berjangka panjang, membangun strategi pengembangan SDM, mendorong pemerataan infrastruktur dan akses digital, serta mengupayakan penciptaan tata kelola pemerintahan digital yang kolaboratif dan adaptif.

Kata Kunci: *Digital Governance*, *E-Readiness*, Integrasi Sistem Pemerintahan, *Smart Province*, Pemerintah Daerah

ABSTRACT

ANALYSIS OF DIGITAL GOVERNANCE READINESS IN LOCAL GOVERNMENTS FOR THE DEVELOPMENT OF A SMART PROVINCE IN LAMPUNG PROVINCE

By

RIZKI AMELIA PUTRI

The Provincial Government of Lampung ranked seventh nationally in the 2023 Electronic-Based Government System Index, recognizing its digital governance efforts. However, in practice, various challenges persist in implementing digital government transformation, highlighting the suboptimal readiness of the regional government. This study aims to analyze the digital governance readiness of the Lampung Provincial Government in supporting the development of a smart province. A qualitative approach with descriptive analysis was employed to identify and gain an in-depth understanding of the region's preparedness in terms of digital governance, particularly in the context of smart province development. The analysis is based on the e-readiness framework of Al-Osaimi et al. (2008), which assesses five main domains of electronic government readiness: strategy, technology, organization, people, and environment, including various sub-domains within. The findings indicate that the Lampung Provincial Government has made significant progress in policy and regulation, core and supporting ICT infrastructure, collaboration with various stakeholders, and support for developing digital human resources. However, major challenges remain, including uneven policy implementation, limited cross-sector coordination, insufficient quantity and quality of human resources, lack of full-service interoperability, and unequal distribution of general technological infrastructure. These findings underscore the importance of establishing a dedicated smart province task force in collaboration with stakeholders, formulating structured and long-term policy directions, developing a human resource capacity-building strategy, promoting equitable infrastructure and digital access, and fostering a collaborative and adaptive model of digital governance.

Keywords: Digital Governance, E-Readiness, Government System Integration, Smart Province, Local Government

Judul Skripsi : **ANALISIS KESIAPAN *DIGITAL GOVERNANCE* PADA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN *SMART PROVINCE* DI PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Rizki Amelia Putri**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2116041021**

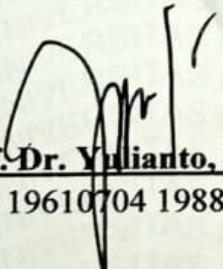
Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



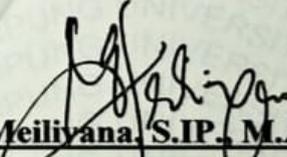
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Prof. Dr. Yulianto, M.S.

NIP. 19610704 198803 1 005



Meiliana, S.IP., M.A.

NIP. 19740520 200112 2 002

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara



Meiliana, S.IP., M.A.

NIP. 19740520 200112 2 002

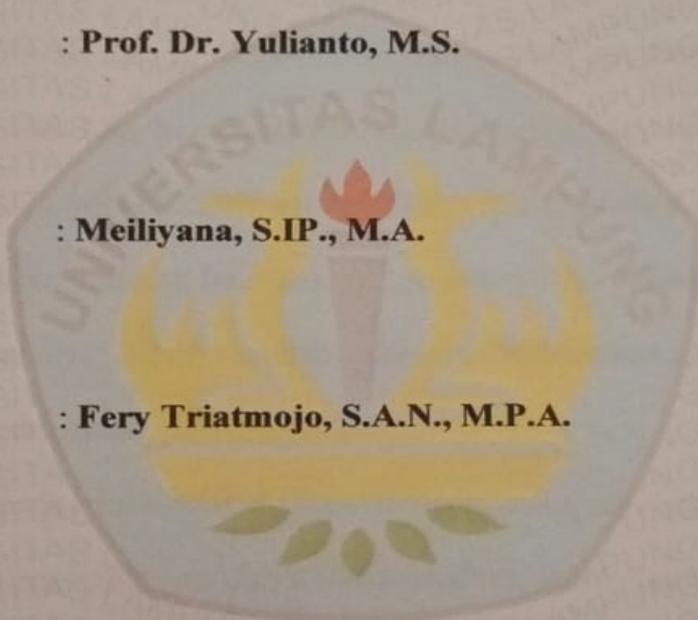
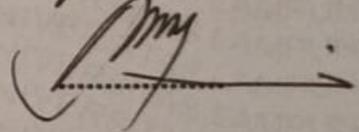
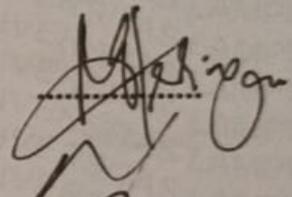
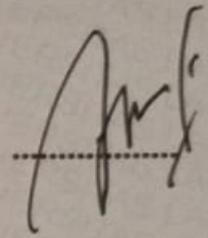
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Yulianto, M.S.

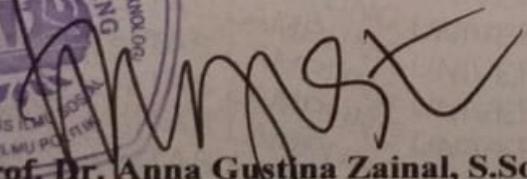
Sekretaris : Meiliyana, S.IP., M.A.

Penguji : Fery Triatmojo, S.A.N., M.P.A.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 10 Juni 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 15 Juni 2025

Yang membuat pernyataan,


Rizki Amelia Putri
NPM. 2116041021

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Rizki Amelia Putri yang lahir di Kota Bandar Lampung pada tanggal 04 Mei 2003. Penulis merupakan putri bungsu dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak M. Yunus dan Ibu Anna. Pendidikan formal yang sudah dilalui oleh penulis berawal dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Ananda, kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 01 Kupang Raya, Kota Bandar Lampung. Lalu melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 16 Bandar Lampung dan melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah Negeri 02 Bandar Lampung. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri di Provinsi Lampung, yaitu Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN dengan mengambil Jurusan Administrasi Negara yang berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi internal kampus. Dalam organisasi internal, penulis mengikuti Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara sebagai anggota Bidang Kajian Pengembangan dan Keilmuan dari tahun 2022 hingga 2024, penulis juga aktif berorganisasi di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Penelitian Universitas Lampung dari tahun 2021 sampai tahun 2023, dan menjabat sebagai Kepala Departemen Hubungan Luar dan Pengabdian Masyarakat pada tahun 2023. Pada komunitas internal, penulis juga tergabung menjadi anggota Just Speak Community melalui Just Speak Scholarship.

Penulis tergabung menjadi anggota Asisten Laboratorium (Aslab) Administrasi dan Kebijakan Publik. Melalui keanggotaan tersebut, penulis mengikuti berbagai kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, seperti penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis pernah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kampung

Curup Patah, Kecamatan Bukit Labuhan, Kabupaten Way Kanan. Selanjutnya, penulis mengikuti kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Studi Independen Bersertifikat pada tahun 2024 di PT. AMATI Indonesia dan berperan menjadi *Chief Executive Officer* (CEO) pada kelompok yang telah dibentuk, yaitu Welwitschia, serta menghasilkan project pemberdayaan bernama WAREYA (Wanita Kreatif Berdaya) pada KUPS (Kelompok Usaha Perhutanan Sosial) Inggar Sejahtera Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Penulis juga pernah mengikuti kegiatan *volunteer* “*Build with Good*” yang diselenggarakan oleh Gajahlah Kebersihan bersama Habitat for Humanity Indonesia pada tahun 2024.

Pengalaman lainnya yang pernah penulis lakukan diantaranya moderator, presenter, *Master of Ceremony* (MC) di beberapa acara kampus. Selain itu, penulis juga pernah menjadi pembicara (*speaker*) pada acara seminar atau pelatihan di bidang keilmiahan. Penulis juga menjadi salah satu peserta program *Intercultural Learning Project* bersama Nanjing Normal University (NNU) China yang diselenggarakan secara *online* pada tahun 2022. Selama berkuliah di Universitas Lampung, penulis telah meraih berbagai penghargaan baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu prestasi internasional yang pernah penulis raih adalah *Gold Medal* dan *IYSA SEMI GRAND AWARD* pada *World Invention Competition and Exhibition* 2023 dan masih banyak lagi penghargaan dengan berbagai kategori juara di tingkat nasional dan internasional.

MOTTO

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”

(QS. Al-Mujadilah: 11)

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : وَإِذَا أَتَانِي مِمَّنْ مَشِي، أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً

“Allah Ta’ala Berfirman:, Jika ia datang kepada-Ku berjalan, maka Aku akan datang kepadanya berlari.”

(HR. Bukhari no. 7405 dan Muslim no. 2675)

“Technology is a tool; the real transformation lies in redesigning processes and mindsets in governance.”

(Prof. Miriam Lips, Chair in Digital Government, Victoria University of Wellington)

*“And if nothing else can keep you going, remember—your heart is still bound to your God.
In the silence, He is the All-Hearing. In your exhaustion, He is the All-Knowing.
When the world turns away from you, Allah remains near, closer than your breath.”*

(R. Amelia Putri)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Atas izin-Nya, penulis diberi kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa syukur. Tanpa bantuan dan pertolongan-Nya, pencapaian ini tentu tidak akan terwujud. Dengan ketulusan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta, Ayah M. Yunus dan Ibu Anna,

yang telah memberikan limpahan kasih sayang, pengorbanan, dan senantiasa memastikan pendidikan yang terbaik kepada penulis. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayah dan Ibu atas segala doa yang senantiasa dilangitkan, dukungan moril dan materil, serta banyaknya pengorbanan yang tak terhitung, yang telah mengiringi penulis dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana ini dengan baik dan sesuai yang diharapkan. Penulis merasa sangat bersyukur kepada Allah SWT memiliki orang tua yang senantiasa mendukung, mendampingi dengan penuh cinta dan kasih sayang di masa sulit, serta ketulusan dan kelapangan hati terhadap penulis. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan dan pengorbanan Ayah dan Ibu dengan pahala yang berlipat ganda, serta senantiasa dilimpahkan kebahagiaan dan kesehatan.

Abang-abang dan Kakak-kakak Tercinta Kanjeng Yurina & Kanjeng Dimas, Atu Intan & Atu Deni, dan Abang Yurian & Gusti Diah,

yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan wejangan kepada penulis, memberikan dukungan moril dan materil, serta membantu penulis dalam hal apapun.

Keponakan-keponakan Tercinta yang Lucu dan Menggemaskan Destra, Rizky, Khanza, Farrel, Kayra, Dan Jennaira,

yang selalu membangkitkan suasana hati yang baik bagi penulis, memberikan perhatian, selalu memberikan pelukan hangat, serta kasih sayang kepada penulis.

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT., dengan limpahan karunia, berkat, dan kasih sayang-Nya, sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **“Analisis Kesiapan *Digital Governance* pada Pemerintah Daerah dalam Pengembangan *Smart Province* di Provinsi Lampung”** ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat beserta salam tak lupa senantiasa dijunjung tinggi kepada pemimpin umat Islam, baginda Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga, sahabat, dan umatnya. Aamiin yaa Rabbal ‘Aalamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam proses perkuliahan dan penulisan skripsi ini mengalami hambatan dan terdapat berbagai kesalahan, namun atas bantuan, bimbingan, dan kerja sama dari berbagai pihak dan tentunya izin Allah SWT, sehingga hambatan yang dihadapi tersebut dapat teratasi. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Yulianto, M.S., terima kasih telah menjadi dosen pembimbing sekaligus dosen pembimbing akademik (PA) yang memberikan banyak pemahaman dan pembelajaran baru, nasihat dan masukan, serta motivasi yang berharga bagi penulis. Penulis berterima kasih atas seluruh ilmu yang sangat bermanfaat, dukungan yang diberikan, mengupayakan yang terbaik dalam proses penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala pengalaman yang berharga, serta telah menjadi panutan bagi penulis dalam menggapai cita-cita. Semoga Allah SWT memberikan Prof. Yulianto kesehatan dan hal-hal baik di kehidupan.
2. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A., terima kasih telah menjadi dosen pembimbing sekaligus ibu di kampus, yang senantiasa membimbing penulis baik dalam perjalanan menjadi mahasiswa biasa maupun perjalanan menuju penamatan gelar mahasiswa. Terima kasih atas seluruh dukungan, motivasi, nasihat, serta doa baik yang diberikan kepada penulis. Penulis berterima kasih atas segala pembelajaran yang Ibu Meiliyana berikan terhadap penulis hingga mampu mencapai tahap akhir perkuliahan. Semoga seluruh upaya yang ibu curahkan

mendapatkan balasan oleh Allah SWT, senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran di kehidupan.

3. Bapak Fery Triatmojo, S.A.N., M.PA., selaku dosen pembahas dan penguji. Terima kasih telah memberikan banyak ilmu pengetahuan baru kepada penulis. Penulis berterima kasih atas segala saran dan masukan yang sangat bermanfaat untuk memperbaiki kekurangan dan kesalahan yang terdapat di dalam penulisan skripsi. Semoga bapak senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan dalam segala hal dan selalu menjadi inspirasi mahasiswa.
4. Prof. Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D. dan *Miss* Devi Yulianti, S.A.N., M.A., Ph.D., terima kasih atas segala *support*, nasihat, motivasi, bantuan, dan pengalaman yang diberikan kepada penulis. Terima kasih sudah selalu bangga dengan apapun pencapaian yang penulis lakukan. Penulis sangat berterima kasih atas semua pembelajaran hidup yang baik dan motivasi untuk selalu berkembang di kehidupan yang hanya sekali ini. Semoga *Miss* Intan dan *Miss* Devi selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kelancaran dalam segala hal.
5. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A., terima kasih atas segala pembelajaran, bantuan, dukungan, dan motivasi kepada penulis sejak mahasiswa baru. Terima kasih telah memberikan penulis pengalaman pertama dalam mengikuti riset dan pengabdian masyarakat, sehingga penulis mampu memahami dunia perkuliahan dengan sangat baik. Penulis juga berterima kasih kepada Ibu Ita dengan segala hal baik yang telah diberikan. Semoga ibu senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan di kehidupan.
6. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih atas segala ilmu dan pembelajaran yang diberikan kepada penulis selama proses perkuliahan ini. Semoga ilmu yang penulis peroleh dapat menjadi bekal di kehidupan selanjutnya. Semoga apa yang telah bapak dan ibu dosen berikan dapat menjadi ladang pahala dan membawa keberkahan dalam kehidupan.
7. Staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung, terima kasih atas semua bantuan dari awal penulis berkuliah hingga menuju tahap akhir.

Semoga mba-mba semua diberikan kesehatan dan keberkahan di kehidupan.

8. Seluruh informan penelitian yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan penelitian ini. Terima kasih atas bantuan, masukan, informasi, dan saran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
- 9.
10. *Dear M. Shafwan Assalam*, terima kasih atas segala bantuan, dukungan, dan motivasi yang diberikan kepada penulis. Terima kasih telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini, menjadi *partner* dalam perjalanan meraih prestasi, menjadi teman yang baik, dan dukungan dalam menggapai cita-cita. Terima kasih atas segala hal baik yang diberikan kepada penulis. Semoga semua harapan dan doa yang diupayakan dapat terwujud di masa depan. Sampai bertemu di belahan dunia lain, selain tanah air.
11. *Dear Ruweisha dan Artasya Pinka Pangesty*, terima kasih atas segala dukungan, *support*, dan bantuan kepada penulis hingga mampu bersama-sama mencapai tahap penulisan tugas akhir. Terima kasih sudah menjadi pendengar dan teman cerita penulis. Semoga apapun hal baik yang diberikan kepada penulis, bisa memberikan keberkahan kepada keduanya di kehidupan selanjutnya.
12. *Dear Vivi Aprisa*, terima kasih sudah menjadi teman sejak awal menjadi mahasiswa. Penulis berterima kasih kepada Vivi karena telah menjadi teman yang selalu mendengarkan cerita penulis, memberikan semangat, dan teman berbagi suka maupun duka. Semoga hal-hal baik selalu menyertai Vivi.
13. *Dear Ayu Nadila Nursabrina dan Wulan Suci Wahyu Lestari*, terima kasih sudah menjadi tempat ternyaman penulis dalam bercerita dan berbagi semua hal. Penulis berterima kasih kepada Dila dan Wulan atas segala bantuan, dukungan, dan hal-hal baik yang diberikan selama ini. Semoga keduanya selalu dipertemukan dan didekatkan dengan hal-hal baik serta kesuksesan yang dicita-citakan.
14. *Dear Dera Nandia*, terima kasih sudah menjadi sahabat sejak SMA yang selalu memahami penulis dalam keadaan apapun. Penulis berterima kasih kepada Dera atas bantuan dan support selama ini yang sudah diberikan. Semoga Dera selalu diberikan kebahagiaan, hal-hal baik, dan kesuksesan di masa depan.

15. Fans Julianto, Shafwan, Agung, Vivi, Uwi, Pinka, There, Fatoni, C. Dian, Ijul, Muti, Silvia, dan Bima. Terima kasih sudah menemani langkah penulis di dunia perkuliahan. Terima kasih atas segala canda tawa, selalu menemani dalam suka dan duka, semua cerita-cerita ajaibnya, serta kenangan dan momen yang tidak akan pernah terlupakan. Terima kasih sudah menemani penulis dalam perjalanan penulisan skripsi ini. Semoga member FJ selalu dikelilingi hal-hal baik, diberikan kelancaran dalam hidup, serta kesuksesan di masa depan.
16. Chill Society, Wulan, Dila, Elfani, Alin, dan Nur Anisa. Terima kasih Wulan sudah menjadi peran Adit sekaligus Denis di kehidupanku. Terima kasih kepada Dila sudah menjadi kakakku di dunia perkuliahan ini. Terima kasih kepada Elfani sudah menjadi sahabat “mangu-ku” yang baik. Terima kasih kepada Alin sudah menjadi sahabat seperti Patrick Star. Terima kasih kepada Nur Anisa sudah menjadi mbakku yang baik dan penyabar. Terima kasih kepada sahabatku atas segala cerita, teman berbagi suka dan duka, serta segala hal baik yang diberikan kepada penulis. Semoga sahabat-sahabatku diberikan kelancaran dalam hidup dan kesuksesan menggapai impian.
17. Sobat Presi dan PJ Maba, Afif, Syifa, Gery, Naufal, Dila, Elfani, dan Nur Anisa, dan teman-teman Panitia Wismagara 21, terima kasih sudah menjadi teman perjalanan panitia yang melelahkan sekaligus penuh pengalaman hidup. Semoga kesuksesan menyertai kalian.
18. Teman-teman Gilgamara Angkatan 2021, Alghi, Satriono, Velly, dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih telah menjadi teman seperjuangan pada masa perkuliahan, melewati semua lika-liku dunia perkuliahan, berjuang dalam menuntaskan tugas akhir, serta semua pengalaman terbaiknya.
19. Keluarga UKM Penelitian Universitas Lampung, *old* alumni (Kak Chiesa, Kak Amapel, Kak Rily, Kak Dimas, Kak Ratih, Kak Prengki, Kak Indah, Kak Ogas, Kak Musya, Kak Wanda, dan kakak-kakak lainnya) dan *new* alumni (Yuli, Rena, Mely, Annisa, Una, Vivin, Hafiz, Ade, dan teman-teman lainnya), terima kasih atas semua pengalaman terbaik yang dilakukan bersama penulis. Semoga kesuksesan dapat menyertai keluarga UKMP.

20. “*Yuna Family*”, keluarga yang dipikirkan Allah untuk menjadi tempat penulis hidup sejak kecil, bertumbuh, serta memberikan kelimpahan cinta dan kasih sayang kepada penulis yang tak terhingga. Terima kasih kepada Bapak, Mama, Kakak-kakak dan Abang-abangku, serta Keponakanku tercinta atas segala dukungan, motivasi, dan kasih sayangnya kepada penulis hingga penulis mampu menjalani kehidupan dengan baik dan penuh kebahagiaan.
21. Seluruh pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas segala bantuan, masukan, dan inspirasi yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal dengan apa yang telah diberikan kepada penulis kepada semua pihak tersebut. Hanya ucapan terima kasih dan doa yang dapat penulis berikan.
22. *Dear Agungan Sultoni*, terima kasih atas segala bentuk bantuan, *support*, dan hal apapun yang telah diberikan kepada penulis. Terima kasih sudah menjadi *partner in crime* di kehidupan ini dan menjadi *911* untuk segala cerita penulis. Terima kasih sudah saling membantu dalam banyak hal dan selalu meningkatkan hormon endorfin dan oksitosin penulis. Semoga kebahagiaan, kelancaran dalam kehidupan, dan semua takdir baik selalu menyertaimu.
23. *Dear Me, Myself, and I*, terima kasih sudah mampu bertahan sejauh ini. Perjalanan yang dilalui memang tidak mudah, tetapi ternyata hal-hal berat tersebut bisa terlewati. Untuk segala usaha, keputusan-keputusan berat, dan keberanian atas apa yang dipilih, terima kasih sudah mau melalui, menghargai, dan melakukannya dengan maksimal. Dunia memang berat, tetapi pundak ini lebih kokoh dan kuat. Terima kasih sudah mau belajar dari kesalahan dan kegagalan yang dialami, tidak menyerah pada hal-hal yang tidak pasti, dan selalu percaya apa yang diusahakan mampu mengubah takdir menjadi hal yang baik. Terima kasih sudah mau bersabar, mengusahakan diri, dan berusaha memberikan yang terbaik dalam perjalanan kehidupan. Terima kasih sudah selalu berusaha menjadi orang baik bagi orang lain, percayalah apa yang kamu tabur maka itu yang kamu tuai. Terima kasih sudah selalu menjadi diri sendiri.

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Tinjauan Tentang <i>E-Government</i>	14
2.2.1 Definisi <i>E-Government</i>	14
2.2.2 Klasifikasi <i>E-Government</i>	15
2.2.3 Tahapan Pengembangan <i>E-Government</i>	16
2.3 Tinjauan Tentang <i>Digital Governance</i>	17
2.3.1 Konsep <i>Digital Governance</i>	17
2.3.2 Ruang Lingkup <i>Digital Governance</i>	18
2.3.3 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat <i>Digital Governance</i>	20
2.4 Tinjauan Tentang Kesiapan Pemerintahan Berbasis Elektronik (<i>E-Government Readiness</i>)	22
2.4.1 Definisi Kesiapan Pemerintahan Berbasis Elektronik (<i>E-Government Readiness</i>)	22
2.4.2 Model-Model Kesiapan Pemerintahan Berbasis Elektronik (<i>E-Government Readiness</i>)	23
2.4.3 Peran Kesiapan Pemerintahan Berbasis Elektronik (<i>E-Government Readiness</i>)	29
2.5 Tinjauan Tentang <i>Smart Province</i>	31
2.5.1 Konsep <i>Smart Province</i>	31
2.5.2 Komponen Pembentuk <i>Smart Province</i>	32
2.6 Kerangka Berpikir Penelitian.....	34
III. METODE PENELITIAN.....	36
3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian	36

3.2 Fokus Penelitian.....	37
3.3 Lokasi Penelitian.....	40
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	40
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.6 Teknik Analisis Data.....	43
3.7 Teknik Keabsahan Data	45
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	48
4.1.1 Perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Lampung	48
4.1.2 Gambaran Umum <i>Smart Province</i> di Provinsi Lampung	53
4.2 Hasil Penelitian	56
4.3 Pembahasan.....	102
4.3.1 Kesiapan <i>Digital Governance</i> pada Pemerintah Daerah dalam Pengembangan <i>Smart Province</i> dari Domain Strategi (<i>Strategy</i>)	103
4.3.2 Kesiapan <i>Digital Governance</i> pada Pemerintah Daerah dalam Pengembangan <i>Smart Province</i> dari Domain Teknologi (<i>Technology</i>)..	110
4.3.3 Kesiapan <i>Digital Governance</i> pada Pemerintah Daerah dalam Pengembangan <i>Smart Province</i> dari Domain Organisasi (<i>Organization</i>)	120
4.3.4 Kesiapan <i>Digital Governance</i> pada Pemerintah Daerah dalam Pengembangan <i>Smart Province</i> dari Domain Sumber Daya Manusia (<i>People</i>)	130
4.3.5 Kesiapan <i>Digital Governance</i> pada Pemerintah Daerah dalam Pengembangan <i>Smart Province</i> dari Domain Lingkungan (<i>Environment</i>).....	138
V. KESIMPULAN DAN SARAN	147
5.1 Kesimpulan	147
5.2 Saran	149
DAFTAR PUSTAKA	152

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Urutan Provinsi Nilai Indeks SPBE Tertinggi di Indonesia Tahun 2023	2
2. Subindeks Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK) Provinsi Lampung 2021–2022 dalam Badan Pusat Statistik (2022)...	7
3. Penelitian Terdahulu	10
4. Daftar Informan Penelitian.....	42
5. Daftar Dokumen Terkait Penelitian	43
6. Hasil Indeks Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi Lampung Tahun 2023	52
7. Tim Khusus Diskominfo Kota Metro	60
8. Daftar Layanan <i>E-Government</i> pada Pemerintahan Provinsi Lampung	70
9. Matriks Hasil Penelitian	96
10. Tabel Triangulasi Penelitian	167

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Indeks Domain SPBE Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023	3
2. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Provinsi Lampung Tahun 2021–2022	6
3. <i>Overlay Visualization VOSviewer</i>	13
4. <i>E-Readiness Framework</i> STOPE.....	26
5. Komponen Pembentuk <i>Smart City</i> (Cohen, 2015).....	32
6. Kerangka Pikir Penelitian	35
7. Komponen <i>Flow Chart Analysis</i> Miles dan Huberman	45
8. Aplikasi yang akan Diintegrasikan pada Lampung Smart Province.....	54
9. <i>Roadmap</i> Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Lampung	63
10. Portal dan <i>Website</i> Resmi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung	70
11. Siklus Pengembangan Perangkat Lunak	77
12. Wawancara dengan Delfarizi, S.E., M.M., Kepala Bidang Tata Kelola SPBE Diskominfo Kabupaten Lampung Selatan, pada tanggal 03 Februari 2025.....	165
13. Wawancara dengan Ayuna Kintani, S.T., selaku Sistem Analis Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung pada tanggal 18 Februari 2025).....	165
14. (Wawancara dengan Andi Setiyono, S.T., Kepala Bidang Informatika dan Statistik Diskominfo Kota Metro pada tanggal 05 Februari 2025	165
15. Wawancara dengan Fachrizal, S.Kom., M.Kom., selaku Kepala Bidang Pemberdayaan <i>e-Government</i> Diskominfo Kota Bandar Lampung pada tanggal 20 Februari 2025	165
16. Wawancara dengan Muhammad Yusuf Nasution selaku Fungsional Perencana Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Provinsi Lampung pada tanggal 25 Februari 2025	166

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) senantiasa diadopsi dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Menurut Setyawati & Fitriati (2023), penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan kualitas administrasi. Konsep *digital governance* lahir dari adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mempengaruhi konteks pengelolaan negara. *Digital governance* dalam Milakovich (2012) mengacu pada perluasan jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mencakup akses yang lebih cepat terhadap berbagai jaringan telekomunikasi dan aplikasi, serta sebagai teknologi informasi multi-saluran yang saling terintegrasi. Pendekatan *digital governance* ini merupakan bentuk dari pengembangan konsep *e-government* yang telah diterapkan oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia.

Pemerintah Indonesia saat ini mengupayakan percepatan penerapan ekosistem digital yang menjadi penggerak dalam transformasi digital nasional yang terdiri dari berbagai elemen yang menjadi satu-kesatuan dalam mendukung pencapaian tujuan pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital sebagaimana visi Indonesia Emas 2045 melalui Visi Indonesia Digital (VID) 2045 (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2024). Penerapan *digital governance* pada pemerintah Indonesia telah dilakukan dalam kerangka kebijakan dan regulasi, salah satunya melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang memuat upaya penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna. Selain itu, upaya transformasi digital di Indonesia semakin diperkuat melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan

Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Melalui hal ini, Indonesia begitu mengupayakan percepatan digitalisasi termasuk pada tata kelola pemerintahannya.

Upaya penerapan tata kelola pemerintahan digital pada birokrasi di Indonesia mengalami berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Terhitung pada tahun 2024, terdapat 27.000 ribu aplikasi pada level pemerintahan pusat maupun daerah yang tidak terintegrasi. Oleh karena itu, pemerintah pusat menginisiasikan GovTech (*Government Technology*) INA Digital yang ditujukan untuk dapat mengintegrasikan berbagai aplikasi dan data serta mengakselerasi sistem digital pada sejumlah layanan prioritas (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2024 pada <https://jdih.cirebonkab.go.id/>, diakses pada 02 Januari 2025). Meninjau dari inisiasi pemerintah pusat tersebut, maka pemerintah daerah juga diharapkan dapat melakukan integrasi terhadap berbagai pelayanan publik berbasis digital agar dapat memudahkan birokrasi pelayanan pemerintah kepada masyarakat, serta mampu memaksimalkan pemanfaatan dan keterpaduan layanan publik digital.

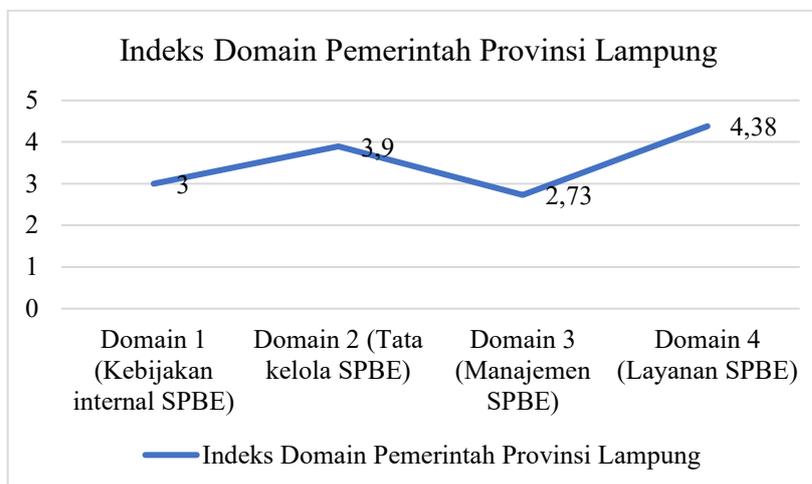
Berdasarkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang disampaikan melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023, menyatakan bahwa hasil pemantauan dan evaluasi SPBE pada Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan indeks 3,81 atau dengan predikat sangat baik dalam penerapan SPBE, serta berada di urutan ketujuh indeks evaluasi SPBE terbaik di Indonesia.

Tabel 1. Urutan Provinsi Nilai Indeks SPBE Tertinggi di Indonesia Tahun 2023

No.	Provinsi	Indeks Evaluasi SPBE	Predikat
1.	Jawa Tengah	4,26	Memuaskan
2.	Daerah Istimewa Yogyakarta	4,22	Memuaskan
3.	Daerah Khusus Jakarta	4,21	Memuaskan
4.	Jawa Barat	4,14	Sangat Baik
5.	Bali	4,07	Sangat Baik
6.	Nusa Tenggara Timur	3,83	Sangat Baik
7.	Lampung	3,81	Sangat Baik
8.	Sumatera Barat	3,75	Sangat Baik

No.	Provinsi	Indeks Evaluasi SPBE	Predikat
9.	Aceh	3,62	Sangat Baik
10.	Jawa Timur	3,62	Sangat Baik

Sumber: Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 13 Tahun 2024



Gambar 1. Indeks Domain SPBE Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023

Sumber: (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2023)

Meskipun demikian, masih terdapat domain penilaian yang cukup kecil, terutama pada domain manajemen SPBE atau domain 3. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Fitri *et al.* (2024) tentang penerapan SPBE di Provinsi Lampung khususnya pada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, yang menjelaskan bahwa penerapan SPBE terhadap domain manajemen yang masih rendah tersebut, meliputi masih rendahnya kematangan pada manajemen risiko SPBE, rendahnya manajemen keamanan informasi, rendahnya manajemen data, rendahnya manajemen aset TIK, rendahnya kompetensi sumber daya manusia, rendahnya manajemen pengetahuan, serta rendahnya manajemen perubahan. Faktor penyebab dari rendahnya domain manajemen dalam penerapan SPBE di Provinsi Lampung ini disebabkan oleh sistem yang masih belum dapat berjalan maksimal, belum terintegrasi dan belum terkoordinasinya dengan baik, serta masih minimnya koordinasi dan kerjasama dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai unsur pelaksana SPBE.

Pemerintah Indonesia telah memberikan desain dan konsep dalam menerapkan *digital governance* pada setiap wilayah di Indonesia melalui penerapan konsep *smart city*. *Smart city* merupakan konsep pembangunan perkotaan yang didasarkan pada pemanfaatan sumber daya manusia secara kolektif dan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan kesejahteraan perkotaan (Angelidou, 2014). Menurut Damanik & Purwaningsih (2018), *smart city* dianggap dapat menangani berbagai permasalahan dalam konteks pemerintahan dan masyarakat, karena melalui penerapan konsep ini maka integrasi antar teknologi dalam meningkatkan produktivitas kinerja di pemerintahan, mengoptimalkan layanan publik, bentuk efisiensi dan efektivitas birokrasi, dan mampu menyediakan akses terhadap berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Melalui keberhasilan penerapan *smart city* tersebut, maka pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengusung gagasan *smart province* sebagai bentuk inovasi di tingkat provinsi yang berfungsi untuk mengoordinasikan pengembangan *smart city* pada lintas kabupaten/kota (aptika.kominfo.go.id, 2022 diakses pada 16 Agustus 2024).

Istilah *smart province* di Indonesia berkembang di masing-masing daerah dengan fokus awal yang orientasi utamanya terletak pada pengembangan *e-government* (Sari *et al.*, 2019). *Smart province* merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan Indonesia Cerdas (*Smart Indonesia*) sebagaimana dengan mandat Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (Putri & Darmawan, 2018). *Smart province* dapat dipahami sebagai suatu provinsi yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mengatasi berbagai permasalahan daerah melalui inovasi digital yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat (aptika.kominfo.go.id, 2022 diakses pada 16 Agustus 2024). Selain itu, Damanik (2019) mengemukakan bahwa program *smart province* merupakan bentuk pengintegrasian atau penyatuan basis data dan layanan berbasis elektronik antar kabupaten/kota dalam rangka mengupayakan peningkatan kualitas layanan publik.

Pemerintah di tingkat provinsi memulai inisiatif menuju *smart province* melalui penerapan *digital governance* yang berhubungan dengan peran langsung pemerintah daerah dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan terhadap

beberapa wilayah yang diimplementasikan di awal sebagai percobaan berskala kecil sebagai percontohan (*pilot project*). Sebagai contoh, daerah yang telah berhasil menerapkan program *smart province* sekaligus menjadi daerah *pilot project* program tersebut adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2024, *Jogja Smart Province* merupakan sebuah pendekatan kreatif dan inovatif dari Pemerintah DIY dan berbagai kelompok pemangku kepentingan dalam upaya penyelesaian isu strategis dan/atau pengembangan sektor unggulan DIY melalui optimalisasi pendayagunaan teknologi, integrasi data, dan kolaborasi antar wilayah untuk mewujudkan kehidupan Jogja yang lebih sejahtera, sehat, nyaman, dan aman. Dengan adanya *good practice* di daerah lain tersebut, maka Pemerintah Provinsi Lampung dapat mengadopsi sesuai dengan kebutuhan daerah.

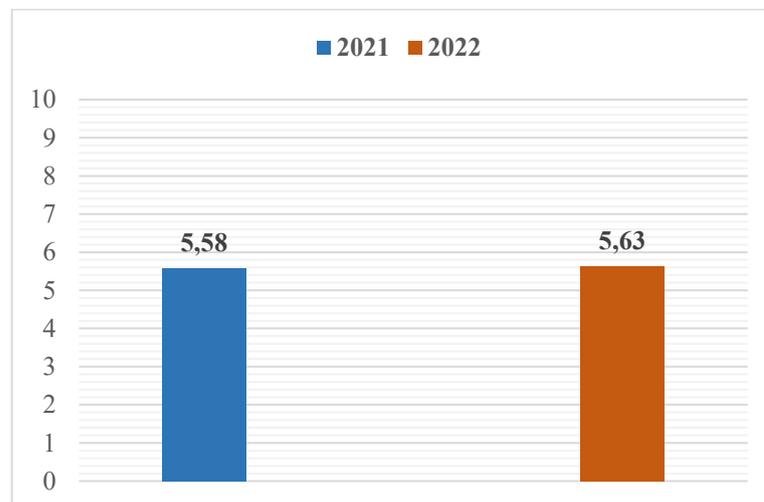
Meskipun demikian, upaya untuk menuju *smart province* seringkali ditemui kendala yang hampir sama dihadapi dalam pengembangan *smart city*, seperti penerapan yang masih bersifat abstrak, kurangnya pendanaan, masih rendahnya keahlian TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi), sulitnya menggabungkan layanan publik, kurangnya partisipasi masyarakat, serta belum efektifnya perencanaan *smart province* (Achmad *et al.*, 2018). Sementara itu, Indrajit *et al.* (2005) dalam Muhammad (2024) mengungkapkan bahwa tingkat kesiapan *e-government* ditinjau melalui enam dimensi meliputi infrastruktur telekomunikasi, tingkat konektivitas dan penggunaan Teknologi Informasi (TI) oleh pemerintah, kesiapan sumber daya manusia di pemerintah, ketersediaan anggaran, perangkat hukum, dan perubahan paradigma.

Provinsi Lampung menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang mengembangkan konsep *smart province* pada pemerintahan daerahnya. Pemerintah Provinsi Lampung dalam hal ini melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung telah membahas mengenai *smart province* melalui *Focus Group Discussion* (FGD) yang membahas mengenai “*Smart Province, Smart Village, dan Smart School*” pada tahun 2019. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung memberikan penekanan bahwa konsep *smart province* dapat dikembangkan melalui sinkronisasi dan integrasi pada data-data yang telah ada melalui penentuan aplikasi dari berbagai

organisasi perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota (bappeda.lampungprov.go.id, 2019 diakses pada 15 Agustus 2024).

Upaya pengembangan *smart province* saat ini masih mengacu pada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Lampung. Pada Peraturan Gubernur ini konteks yang mengacu terhadap aspek perencanaan *smart province* adalah terkait dengan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yaitu kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu, serta penjelasan mengenai Peta Rencana SPBE yaitu dokumen perencanaan yang menjadi acuan pengelolaan SPBE di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Berdasarkan data yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik tahun 2022, Provinsi Lampung memiliki rincian Indeks Pembangunan TIK dan Subindeks yang meliputi akses dan infrastruktur TIK, penggunaan TIK, dan keahlian TIK pada rentang waktu 2021–2022 sebagai berikut:



Gambar 2. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Provinsi Lampung Tahun 2021–2022

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Tabel 2. Subindeks Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK) Provinsi Lampung 2021–2022 dalam Badan Pusat Statistik (2022)

No.	Subindeks IPTIK	2021	2022
1.	Akses dan Infrastruktur TIK	5,68	5,57
2.	Penggunaan TIK	4,78	5,05
3.	Keahlian TIK	6,80	6,77

Sumber: Badan Pusat Statistik (2022)

Berdasarkan data pada gambar dan tabel 2, dapat dipahami bahwa Indeks Pembangunan TIK di Provinsi Lampung pada rentang waktu tahun 2021–2022 mengalami peningkatan hanya sebesar 0,05 di mana pada tahun 2021 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IPTIK) Provinsi Lampung pada skor 5,58, sementara pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang kurang signifikan yaitu dengan skor 5,63. Sementara itu, dirincikan lebih lanjut terdapat Subindeks TIK Provinsi Lampung dalam rentang tahun 2021–2022 mengalami penurunan poin subindeks pada akses dan infrastruktur, serta keahlian TIK (Badan Pusat Statistik, 2022). Dengan demikian, pemerintah daerah Provinsi Lampung perlu membenahi berbagai kelengkapan TIK terutama yang digunakan dalam menunjang pengembangan *smart province*.

Upaya pengembangan *smart province* di Provinsi Lampung memerlukan kesiapan tata kelola pemerintahan digital (*e-government readiness*) oleh pemerintah daerah. Damanik & Purwaningsih (2018) mengungkapkan bahwa kesiapan implementasi TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) atau *ICT (Information and Communication Technology) Readiness* dipahami sebagai kemampuan suatu organisasi dalam membangun dan mengadopsi TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi). Mengukur kesiapan organisasi pemerintah menjadi hal yang penting untuk dilakukan sebelum maupun saat pengimplementasian *e-government* yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pemerintah. Hal ini selaras dengan pendapat Damanik (2019) bahwa dalam mengimplementasikan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) termasuk pada program *smart province*, perlu memperhatikan kesiapan secara matang dari berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, infrastruktur teknologi dalam rangka memenuhi kebutuhan umum, serta

tata kelola yang meliputi kebijakan atau peraturan daerah, kelembagaan, dan tata pelaksanaan pembangunan *smart province*.

Tata kelola pemerintahan digital (*digital governance*) oleh pemerintah daerah memerlukan proses perencanaan yang matang untuk meninjau berbagai komponen kelengkapan dalam mengoptimalkan pengimplementasian program melalui analisis mendalam untuk mengetahui kesiapan penerapan pemerintahan berbasis elektronik (*e-government readiness*). Menurut Herawati & Djunaedi (2020), pada dasarnya pengukuran kesiapan daerah dalam menerapkan konsep *smart city* di daerahnya akan mampu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam perumusan perencanaan strategi yang akan diterapkan. Selain itu, Nugroho (2020) mengemukakan bahwa penilaian terhadap tingkat kesiapan pemerintahan berbasis elektronik (*e-government readiness*) memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi isu atau permasalahan yang ada, sehingga dapat merumuskan alternatif kebijakan yang sesuai. Hal ini bertujuan untuk memastikan keberhasilan implementasi *e-government* yang sejalan dengan tingkat kesiapan yang dimiliki, serta didasarkan pada bukti-bukti yang relevan.

Berdasarkan pra-riset yang dilakukan oleh peneliti, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung telah melaksanakan proses perencanaan pembangunan *smart province*, serta Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung memberikan tupoksi khusus kepada Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam melakukan penyelenggaraan ekosistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) *smart province*. Akan tetapi, temuan di lapangan menunjukkan bahwa pemerataan terhadap kualitas digitalisasi di pemerintah masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti terjadi ketimpangan infrastruktur ataupun keterbatasan sumber daya manusia yang mendukung pengembangan teknologi.

Meskipun demikian, pemerintah daerah Provinsi Lampung masih memerlukan kesiapan dari berbagai aspek untuk melihat kematangan tata kelola pemerintahan digital dalam proses pengembangan *smart province*. Proses perencanaan memiliki peran yang krusial dalam suatu kebijakan publik karena potensi keberhasilan

implementasi dapat terlihat dari kematangan perencanaan atau formulasi kebijakan dengan melihat kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola pemerintahan digital (*digital governance*) dalam pengembangan *smart province* di Provinsi Lampung. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Kesiapan *Digital Governance* pada Pemerintah Daerah dalam Pengembangan *Smart Province* di Provinsi Lampung**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana kesiapan *digital governance* pada pemerintah daerah dalam pengembangan *smart province* di Provinsi Lampung berdasarkan penilaian *e-government readiness*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan suatu target atau sasaran yang ingin dicapai. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam mengenai kesiapan *digital governance* pada pemerintah daerah dalam pengembangan *smart province* di Provinsi Lampung berdasarkan penilaian *e-government readiness*.

1.4 Manfaat Penelitian

Merujuk pada penelitian ini, penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dalam segi teoritis maupun praktis, sebagaimana berikut ini:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan Ilmu Administrasi Negara khususnya yang berkaitan dengan digitalisasi tata kelola pemerintahan atau *digital governance*.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pandangan yang lebih luas dan rekomendasi mengenai kesiapan *digital governance* pada pemerintah daerah dalam pengembangan *smart province* sebagai bahan untuk merumuskan berbagai rencana kebijakan yang terkait dengan *smart province* di Provinsi Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan penelitian terdahulu sebagai salah satu kerangka acuan dalam memperkaya teori yang digunakan terhadap kajian penelitian yang dilakukan. Peneliti menggunakan tinjauan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Relevansi Penelitian
1.	(Damanik & Purwaningsih, 2018)	Kesiapan <i>E-Government</i> Pemerintah Daerah Menuju Pengembangan <i>Smart Province</i> (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dalam pelaksanaan <i>e-government</i> belum maksimal. Hal ini didasarkan pada beberapa aspek pada pengukuran kesiapan masih belum dapat terpenuhi.	Dari hasil penelitian tersebut, persamaan penelitian terletak pada pembahasan penelitian yang membahas mengenai kesiapan pemerintah daerah menuju pengembangan <i>smart province</i> , sementara itu perbedaan penelitian terletak pada lokus penelitian di mana penelitian Damanik & Purwaningsih berfokus pada pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, sedangkan peneliti memiliki lokus penelitian pada pemerintah provinsi tepatnya pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
2.	(Muhammad, 2024)	Analisis Kesiapan <i>E-Government</i> dalam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi partisipasi masyarakat, regulasi,	Berdasarkan hasil penelitian tersebut, persamaan penelitian terdapat pada

Mewujudkan <i>Smart Governance</i> di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Selatan	serta peran aktif pemerintah masih kurang, akan tetapi pada dimensi kesiapan SDM pada pemerintah daerah, tingkat konektivitas penggunaan TI, dan perubahan paradigma sudah berjalan baik. Infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Muna dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, hanya saja pada infrastruktur jaringan masih belum maksimal terkhusus daerah pelosok yang masih sulit dalam mengakses internet. <i>Smart governance</i> pada Kabupaten Muna dalam mengambil keputusan selalu melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat yang diwakilkan oleh kepala kecamatan mengadakan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) bersama Bupati Muna yang diadakan tiap tahun. Kesimpulan pada penelitian ini bahwa kesiapan <i>e-government</i> dalam upaya mewujudkan <i>smart governance</i> di Kabupaten Muna berjalan cukup baik.	pembahasan penelitian yang membahas mengenai kesiapan <i>e-government</i> (tata kelola pemerintahan berbasis elektronik) menggunakan analisis <i>e-readiness</i> , sementara itu perbedaan penelitian terletak pada fokus pembahasan di mana penelitian Muhammad memilih fokus pada perwujudan <i>smart governance</i> , sementara dalam penelitian ini peneliti memiliki fokus yang lebih luas terhadap pengembangan <i>smart province</i> .
3. (Sari dkk., 2019) Kesiapan Daerah Menuju Jawa Barat <i>Smart Province</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek kesiapan daerah, enam daerah yang menjadi sampel penelitian menunjukkan kesiapan dalam menyongsong <i>Jabar Smart Province</i> (JSP), namun dengan kategori berbeda-beda. Kota Banjar sedang menyiapkan berbagai terutama pada indikator tata kelola yang menjadi dasar pelaksanaan	Dari hasil penelitian tersebut, terdapat persamaan penelitian yang terletak pada fokus pembahasan berupa analisis kesiapan pemerintah daerah dalam mewujudkan <i>smart province</i> . Sementara itu, perbedaan penelitian terletak pada lokus penelitian di mana penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya memfokuskan pada

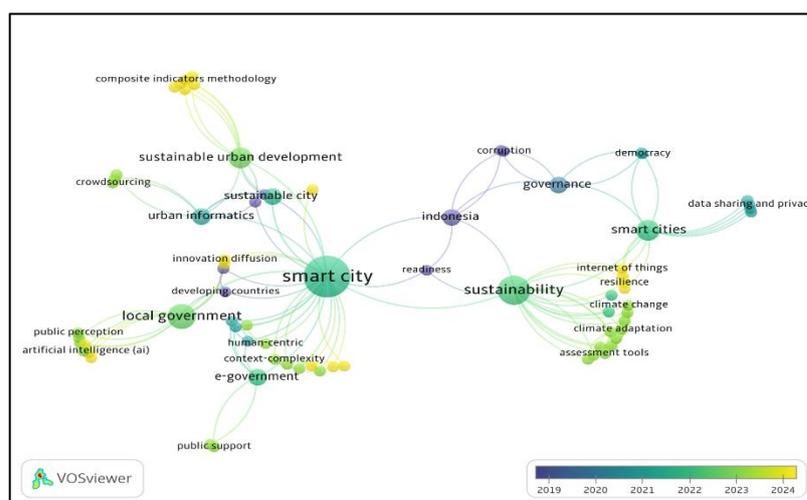
implementasi TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi). Sementara itu, Kota Cimahi telah siap dengan tata kelola yang telah diimplementasikan, infrastruktur yang telah terintegrasi, dan sebagian layanan sudah terintegrasi dan inventarisasi layanan yang dilakukan. Kemudian, pada Pemerintah Kabupaten Cirebon terlihat pada tingkat kematangan yang telah dikatakan baik karena sudah melakukan *sharing* data. Selanjutnya, pada Pemerintah Kabupaten Purwakarta Pemerintah Kota Bogor, serta Pemerintah Kabupaten Garut telah menyiapkan diri menuju JSP, hal ini dapat terlihat dari dilakukannya inisiasi dalam pengembangan layanan berbasis TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) meskipun masih secara parsial.

Gambaran mengenai kesiapan daerah menuju *Jabar Smart Province* ini dapat menjadi informasi bagi pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi dalam menyelaraskan program-program yang dapat mendorong terwujudnya *Jabar Smart Province*.

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2024)

Berdasarkan penelitian terdahulu pada tabel 3, maka dapat disimpulkan bahwa relevansi penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada identifikasi kesiapan *e-government* maupun kesiapan daerah dalam mendukung konsep *smart governance* atau *smart province*. Sementara itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada penggunaan teori yang lebih spesifik dan mencakup aspek kesiapan secara lebih menyeluruh di mana penelitian ini menggunakan teori *e-readiness framework* STOPE yang dikemukakan oleh Al-Osaimi *et al.* (2008).

Selain penelitian terdahulu, untuk meninjau pemetaan tren penelitian mengenai topik kesiapan *digital governance* melalui analisis kesiapan elektronik pemerintahan (*e-government readiness*) dalam pengembangan *smart province*, peneliti menggunakan alat pendukung dalam penelitian ini yaitu perangkat lunak (*software*) *VOSviewer*. Peneliti juga menggunakan database pencarian artikel ilmiah melalui aplikasi *Harzing's Publish or Perish 8* dan mencari berdasarkan kata kunci seperti: *smart province*, *smart city*, *digital governance*, *e-government readiness*, dan *local government*. Sementara itu, sumber artikel diperoleh melalui sistem pencarian *Google Scholar*, *Crossref*, dan *ScienceDirect (Scopus)*. Melalui pencarian tersebut, maka peneliti mengumpulkan sekitar 450 artikel ilmiah yang kemudian dipetakan dan divisualisasikan melalui *VOSviewer* berdasarkan kata kunci yang terkait.



Gambar 3. Overlay Visualization VOSviewer

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2025

Gambar tersebut menampilkan *overlay visualization* yang menganalisis keterkaitan topik dengan memperlihatkan hubungan antar kata kunci yang saling beririsan dan membentuk *interdisciplinary research*. Dalam tampilan tersebut, muncul kata kunci utama (dapat terlihat melalui node besar) yaitu “*e-government*”, “*local government*”, dan “*readiness*”, yang terhubung secara langsung dengan kata kunci “*smart city*” (merupakan bentuk awal *smart province*). Hal ini mengindikasikan bahwa aspek tata kelola pemerintahan digital dan kesiapan pemerintah daerah menjadi isu penting dalam literatur pembangunan kota cerdas. Hal ini mendukung relevansi penelitian yang dilakukan.

Node dengan warna biru menandakan dominan pada periode 2019–2020, sementara node kuning menandakan artikel dari tahun 2023 hingga 2024 yang memperlihatkan tren perkembangan topik di setiap tahunnya. Dengan demikian, hasil pemetaan ini tidak hanya menunjukkan kesesuaian topik penelitian dengan tren global, namun juga memberikan dasar kuat dalam memilih variabel-variabel relevan dalam analisis kesiapan *digital governance*. Melalui visualisasi tersebut juga mempertegas pentingnya sinergi antara aspek tata kelola, teknologi, serta dukungan dan partisipasi SDM dalam membangun ekosistem *smart province* yang ideal.

2.2 Tinjauan Tentang *E-Government*

2.2.1 Definisi *E-Government*

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, *e-government* dapat dipahami sebagai upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Aktivitas pemanfaatan teknologi informasi ini berkaitan pada dua hal, yaitu pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik, serta pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

Menurut Wicaksono (2023), *e-government* didefinisikan sebagai transformasi proses dan struktur melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola yang mencakup perbaikan dalam kualitas layanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat, serta penguatan akuntabilitas pemerintah. Sementara itu, Irma dkk. (2023) mendefinisikan *e-government* sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam menjalankan pemerintahan, terutama dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat dan penyediaan layanan masyarakat. Penerapan *e-government* ini dimaksudkan untuk mempermudah masyarakat dalam menerima pelayanan dengan mengubah proses pelayanan konvensional menjadi prosedur pelayanan berbasis internet.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *e-government* merupakan upaya penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui penerapan *e-government* maka diharapkan pelayanan publik dapat lebih mudah diakses, serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, akuntabilitas pemerintah, dan kualitas tata kelola pemerintahan.

2.2.2 Klasifikasi E-Government

E-government diklasifikasikan menjadi empat tipe relasi menurut Indrajit (2016), di antaranya yaitu:

1. *Government to Citizens (G2C)*

Government to Citizens diartikan sebagai penerapan *e-government* dengan mekanisme pemerintah membangun dan mengaplikasikan teknologi informasi dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan atau interaksi dengan masyarakatnya. *G-to-C* berupaya untuk menghubungkan pemerintah dengan masyarakat melalui internet dan sistem digital lainnya agar masyarakat dapat lebih mudah

mengakses pelayanan yang diberikan oleh pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan.

2. *Government to Business (G2B)*

Government to Business ditujukan untuk membentuk lingkungan bisnis yang kondusif sebagaimana ditujukan untuk penstabilisasi roda perekonomian sebuah negara. Pada pelaksanaan aktivitas bisnis, perusahaan swasta membutuhkan beragam data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Dengan demikian, dibutuhkan relasi yang baik antara pemerintah dan swasta yang tidak hanya memperlancar aktivitas perusahaan, namun juga memberikan keuntungan kepada pemerintah apabila terjadi interaksi yang baik dan efektif.

3. *Government to Government (G2G)*

Government to Government ditujukan untuk memenuhi kebutuhan interaksi antar pemerintah untuk memperlancar proses kerjasama terhadap internal pemerintahan. Bentuk *G-to-G* ini sebagai bagian dari *e-government* yang dimaksudkan untuk menguatkan internal pemerintah agar mampu saling terintegrasi baik di tingkat pusat maupun daerah.

4. *Government to Employees (G2E)*

Government to Employees diperuntukkan dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan sebagai pelayan masyarakat di berbagai institusi. *G-to-E* ini digunakan untuk memudahkan aparatur pemerintahan dalam menjalankan segala aktivitas baik dalam kegiatan atau proses pemerintahan maupun kegiatan melayani kebutuhan publik.

2.2.3 Tahapan Pengembangan *E-Government*

Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, pengembangan *e-government* dapat dilaksanakan melalui empat tingkatan berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan

publik yang disediakan oleh pemerintah melalui jaringan informasi, meliputi:

1. Tingkat Pertama, persiapan yang meliputi:
 - a. pembuatan situs informasi di setiap lembaga;
 - b. penyiapan sumber daya manusia;
 - c. penyiapan sarana akses yang mudah, misalnya penyediaan sarana *Multipurpose Community Center*, *Warnet*, *SME-Center*, dan lain-lain; serta
 - d. sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik.
2. Tingkat Kedua, pematangan yang meliputi:
 - a. pembuatan situs informasi publik interaktif; serta
 - b. pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain.
3. Tingkat Ketiga, pemantapan yang meliputi:
 - a. pembuatan situs transaksi pelayanan publik; serta
 - b. pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.
4. Tingkat Keempat, pemanfaatan yang meliputi:
 - a. pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B, dan G2C yang terintegrasi.

2.3 Tinjauan Tentang *Digital Governance*

2.3.1 Konsep *Digital Governance*

Digital governance menjadi bentuk pengembangan dari konsep *e-government* yang saat ini sedang dilakukan pengembangan di Indonesia. Meskipun demikian, produk hukum pada *e-government* masih mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Peraturan ini menjelaskan bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Digital governance merupakan kerangka kerja untuk menetapkan akuntabilitas, peran, dan wewenang pengambilan keputusan untuk menghadirkan digitalisasi pada suatu organisasi, yang berarti situs web, situs seluler, saluran sosial, dan semua produk serta layanan berbasis internet dan web lainnya. Memiliki kerangka kerja *digital governance* yang dirancang dengan baik akan dapat meminimalkan jumlah perdebatan taktis mengenai sifat dan pengelolaan kehadiran digital pada suatu organisasi (Welchman, 2015).

Algazo *et al.* (2021) mengemukakan bahwa *digital governance* merupakan bentuk penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan pengoperasional dalam pemerintahan untuk dapat meningkatkan penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat dan pengguna layanan pemerintah lainnya, serta sebagai bentuk integrasi antara pemerintah dengan lingkungan politik, sosial, administratif, dan lingkungan yang lebih luas.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *digital governance* adalah kerangka kerja yang mengatur struktur, proses, dan tanggung jawab yang mencakup perencanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan teknologi digital di dalam pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan integrasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

2.3.2 Ruang Lingkup *Digital Governance*

Welchman (2015) mengungkapkan terdapat tiga ruang lingkup *digital governance*, yaitu sebagai berikut:

1. Strategi Digital (*Digital Strategy*)

Strategi digital dapat diartikulasikan sebagai pendekatan dalam organisasi publik untuk memanfaatkan kemampuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dalam strategi digital diperlukan

penyertaan terhadap serangkaian sumber daya yang tepat untuk mengidentifikasi sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menetapkan strategi digital pada suatu organisasi publik. Strategi digital memiliki dua aspek penting yaitu:

- a) Prinsip Panduan, yaitu sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas nilai-nilai organisasi secara digital.
- b) Sasaran Kinerja, yaitu sebagai bentuk pendefinisian secara kuantitas terhadap kesuksesan penerapan digital pada suatu organisasi.

2. Kebijakan Digital (*Digital Policy*)

Kebijakan digital merupakan pernyataan panduan yang ditetapkan oleh organisasi publik untuk mengelola risiko dan memastikan tujuan organisasi dapat berjalan melalui digitalisasi. Dalam kerangka *digital governance*, kebijakan digital memberikan pandangan relatif objektif, terinformasi, dan bersifat komprehensif terhadap implikasi digital bagi organisasi yang menerapkannya. Kebijakan digital ini perlu diselaraskan dengan kebijakan lain yang dikeluarkan oleh suatu organisasi publik agar kebijakan mampu saling terintegrasi.

3. Standar Digital (*Digital Standards*)

Standar digital diartikan sebagai upaya organisasi publik dalam memastikan berjalannya kualitas dan efektivitas digitalisasi secara optimal, serta bersifat luas dan mendalam. Standar digital ini berkaitan dengan pengalaman pengguna dan strategi dalam penyelesaian masalah secara keseluruhan, sehingga dibutuhkan sumber daya yang juga luas dan mendalam untuk berkontribusi dalam penerapan standar digital agar sesuai dengan prosedur.

2.3.3 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat *Digital Governance*

1. Faktor Pendukung *Digital Governance*

Hansiden (2024) mengungkapkan teknologi digital memiliki pengaruh besar terhadap proses penyelenggaraan tata kelola organisasi dan pemerintahan. Berikut merupakan faktor pendukung dalam penerapan *digital governance*, yaitu sebagai berikut:

a) Mempercepat dan Memudahkan Akses Informasi

Teknologi digital yang diadaptasi oleh organisasi pemerintah sebagai penunjang tata kelola akan memungkinkan akses informasi yang lebih cepat, serta memudahkan organisasi publik dalam pengambilan keputusan secara akurat dan tepat.

b) Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Layanan

Tata kelola pemerintahan digital akan memungkinkan organisasi publik dalam menjalankan kegiatan operasional dan proses otomatisasi secara efektif dan efisien.

c) Memperkuat Partisipasi Publik

Penerapan *digital governance* akan memungkinkan peningkatan partisipasi publik yang lebih luas dan transparan dalam proses pengambilan keputusan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini akan berimplikasi terhadap peningkatan legitimasi masyarakat terhadap pemerintah.

d) Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Melalui tata kelola pemerintahan dengan mengadaptasi teknologi digital, maka proses penyampaian keputusan yang diambil oleh pemerintah dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini dapat terlihat dengan peningkatan keterbukaan informasi terhadap berbagai kebijakan, program, dan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah yang juga menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap kebijakan yang diambil.

e) Meningkatkan Kolaborasi Antar Organisasi

Adaptasi *digital governance* memungkinkan kolaborasi yang lebih baik antara organisasi dan pemerintah maupun pemerintah dan masyarakat yang dapat meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan.

2. Faktor Penghambat *Digital Governance*

Menurut Kuntoro & Suseno (2024), terdapat berbagai faktor penghambat dalam penerapan digitalisasi di sektor pemerintahan terutama pada layanan publik, di antaranya yaitu:

a) Infrastruktur Teknologi yang Kurang Memadai

Kendala pada kondisi infrastruktur teknologi yang kurang memadai menjadi salah satu hambatan dalam proses menuju pemerintahan digital. Hambatan ini menyebabkan upaya penyediaan layanan publik yang efisien dan inklusif menjadi lebih lambat. Salah satu penyebab dari belum memadainya infrastruktur teknologi ini adalah kesenjangan akses dan kualitas layanan internet antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta masih rendahnya partisipasi masyarakat yang menimbulkan terhambatnya penyelenggaraan pelayanan publik secara efektif.

b) Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Keterampilan Digital

Urgensi terhadap adaptasi dalam sistem kerja melalui digital mengungkapkan keterbatasan keterampilan digital oleh para aparatur pemerintah dan menuntut kapasitas mereka dalam digitalisasi. Selain itu, kekurangan keterampilan digital menghambat kemampuan institusi pemerintah dalam penyediaan layanan yang lebih responsif, efektif, dan inovatif terhadap kebutuhan masyarakat.

c) Lemahnya Keamanan Siber dan Privasi Data

Privasi data dan keamanan siber menjadi salah satu hal krusial dalam menunjang penerapan digitalisasi pada pelayanan publik. Timbulnya kekhawatiran terhadap keamanan dalam privasi data muncul seiring dengan berbagai permasalahan yang terjadi

selama proses adopsi teknologi digital yang dilakukan oleh pemerintah. Bentuk digitalisasi pemerintah dalam layanan publik semakin meningkatkan risiko eksklusi digital dan menimbulkan berbagai pertanyaan oleh masyarakat terkait data pribadi mereka. Potensi penyerangan keamanan digital ini disebabkan oleh infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang tidak memadai serta kurangnya kesadaran dan keterampilan keamanan siber pada pengelola dan pengguna layanan publik.

2.4 Tinjauan Tentang Kesiapan Pemerintahan Berbasis Elektronik (*E-Government Readiness*)

2.4.1 Definisi Kesiapan Pemerintahan Berbasis Elektronik (*E-Government Readiness*)

Definisi kesiapan pemerintahan berbasis elektronik (*e-government readiness*) dapat dipahami melalui berbagai pandangan dan konsep yang dikemukakan oleh para ahli yang dapat mencakup berbagai pandangan dan definisi terhadap konsep kesiapan elektronik pemerintahan. Adapun beberapa definisi kesiapan pemerintahan berbasis elektronik (*e-government readiness*), yaitu:

1. Basri (2024) mengungkapkan kesiapan pemerintahan berbasis elektronik atau *e-government readiness* merupakan bentuk kemampuan lembaga pemerintah dalam menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mengubah layanan publik yang bersifat konvensional menjadi layanan publik berbasis teknologi.
2. Menurut Majapahit & Hexagraha (2021) kesiapan pemerintahan berbasis elektronik (*e-government readiness*) merupakan bentuk dari kemampuan dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagai upaya meningkatkan kinerja pemerintahan dalam pembangunan wilayahnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Chipembele & Bwalya (2016) mengemukakan kesiapan pemerintahan berbasis elektronik (*e-government readiness*) sebagai kesiapan kemampuan dan kapasitas *stakeholders* dalam pengintegrasian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai proses penyelenggaraan organisasi dengan memanfaatkan berbagai peluang digital untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat.

Sementara itu, Nento *et al.* (2017) mengungkapkan bahwa kesuksesan dalam penerapan *digital governance* dengan melihat sejauh mana bentuk kesiapan pemerintahan dalam menyikapi kelemahan-kelemahan yang ada. Efektifitas hasil pengukuran *e-government readiness* dapat ditentukan dengan meninjau persoalan-persoalan yang ada, merumuskan solusi, dan menetapkan faktor dan indikator *e-government readiness* yang relevan.

Dengan adanya pengertian menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kesiapan pemerintahan berbasis elektronik (*e-government readiness*) adalah kemampuan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam meningkatkan layanan publik dan kinerja pemerintahan.

2.4.2 Model-Model Kesiapan Pemerintahan Berbasis Elektronik (*E-Government Readiness*)

Pengembangan berbagai model dan alat penilaian untuk kesiapan penerapan pemerintahan berbasis elektronik (*e-government readiness*) memiliki berbagai variasi dalam tujuan, metodologi, dan hasil. Berikut beberapa model *e-readiness* yang dapat digunakan untuk menganalisis kesiapan pemerintah dalam penerapan pemerintahan berbasis elektronik.

1. Model *New e-Readiness Integrated Modern* (Mutula & Brakel, 2006)

Mutula & Brakel (2006) mengemukakan bahwa penilaian kesiapan elektronik menunjukkan pentingnya memperhatikan berbagai aspek termasuk kemampuan organisasi atau individu dalam pemanfaatan TIK di era informasi global. Adapun indikator *new-readiness integrated modern* terdiri dari lima segmen diantaranya, yaitu segmen kesiapan informasi, segmen kesiapan TIK, segmen kesiapan organisasi, segmen kesiapan sumber daya manusia, dan segmen kesiapan lingkungan eksternal.

2. Model *e-Government Local Readiness* (Indrajit *et al.*, 2005)

Menurut Indrajit *et al.* (2005) penerapan *e-government* didasarkan pada dua hal utama, yaitu kebutuhan masyarakat yang menjadi prioritas utama saat ini dan ketersediaan sumber daya yang terdapat pada domain masyarakat dan pemerintah dari suatu daerah. Berikut merupakan faktor penentu yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan tingkat kesiapan suatu daerah dalam penerapan *e-government*, yaitu:

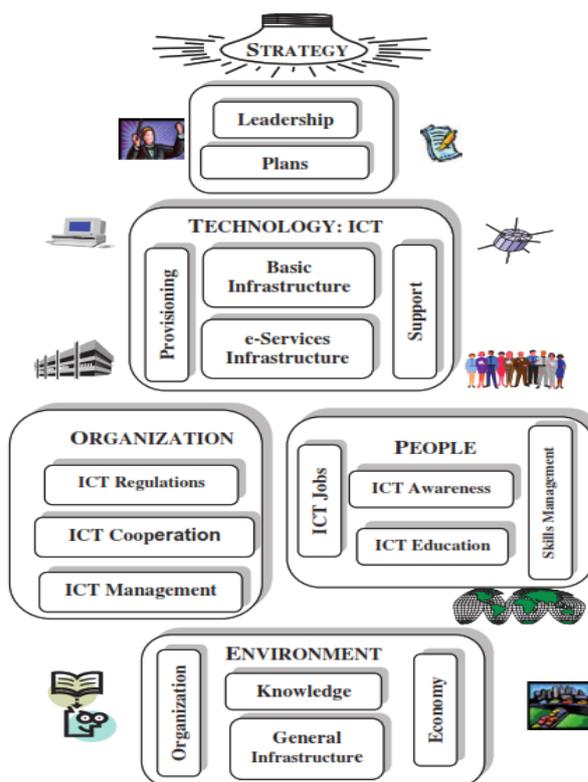
a) Infrastruktur Telekomunikasi

Dalam implementasinya, perangkat keras seperti tingkat kualitas jaringan, dan infrastruktur teknologi menjadi salah satu faktor penting dalam penerapan *e-government*. Penyediaan infrastruktur telekomunikasi harus tersedia sesuai dengan kebutuhan sebagai upaya untuk menunjang target maupun sebagai prioritas pengembangan *e-government*. Akan tetapi, pertimbangan terhadap potensi dan kemampuan maupun status pengembangan infrastruktur telekomunikasi juga perlu diperhatikan apabila masih terdapat daerah yang minim kualitas infrastruktur telekomunikasi.

- b) **Tingkat Konektivitas dan Penggunaan Teknologi Informasi**
Pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah perlu diperhatikan dan diamati untuk meninjau sejauh mana penggunaannya dapat membantu dalam kegiatan birokrasi. Hal ini dapat memperlihatkan sejauh mana kesiapan pemerintah dalam penerapan *e-government* atau *digital governance*.
- c) **Kesiapan Sumber Daya Manusia di Pemerintahan**
Kompetensi dan keahlian sumber daya manusia di lembaga pemerintahan perlu ditinjau lebih dalam untuk melihat performa mereka dalam penerapan *e-government*. Semakin tinggi literasi teknologi informasi (*information technology literacy*) aparatur pemerintah, maka semakin siap organisasi publik dalam menerapkan *e-government*.
- d) **Ketersediaan Dana dan Anggaran**
Pemerintah daerah perlu memiliki jaringan yang cukup dan memadai terhadap berbagai sumber dana dan memiliki otoritas dalam menganggarkan perlengkapan dalam menunjang penerapan *e-government*. Dana dan anggaran yang dibutuhkan ini tidak hanya sebagai sumber investasi, namun juga memerlukan anggaran dalam hal biaya operasional, pemeliharaan, dan pengembangan.
- e) **Perangkat Hukum**
Konsep *e-government* memiliki keterkaitan dengan penciptaan dan pendistribusian data atau informasi dari satu pihak ke pihak lainnya, permasalahan dalam keamanan data atau informasi, serta hak cipta intelektual seperti perlunya perlindungan melalui undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku. Pemerintah perlu memiliki perangkat hukum khusus untuk menjamin terciptanya *e-government* yang kondusif.
- f) **Perubahan Paradigma**
Penerapan *e-government* merupakan suatu proyek manajemen perubahan (*change management*) yang memerlukan perubahan

terhadap paradigma ataupun cara berpikir. Perubahan terhadap paradigma membutuhkan kesadaran dan keinginan untuk merubah cara kerja, sikap, perilaku, dan kebiasaan para aparatur pemerintahan. Apabila sumber daya manusia di pemerintahan tidak memiliki keinginan terhadap suatu perubahan, maka dapat dikatakan belum siap dalam menerapkan konsep *e-government*.

3. Model *E-Readiness Framework* STOPE (Al-Osaimi *et al.*, 2008)



Gambar 4. *E-Readiness Framework* STOPE

Sumber: Al-Osaimi *et al.* (2008)

a) Strategi (*Strategy*)

Strategi menjadi faktor penting dalam kesiapan digitalisasi pada pemerintahan. Strategi ini berkaitan dengan pencapaian visi dan menyelesaikan misi melalui perencanaan yang sesuai dengan pengembangan proyek untuk mencapai rencana dan mengarahkan pada implementasi proyek. Strategi dalam mewujudkan *smart province* ini berkaitan dengan kompleksitas,

proses jangka panjang, serta bergantung pada komitmen berkelanjutan untuk langkah yang jelas menuju keberhasilan implementasi (Utomo & Hariadi, 2016). Domain strategi meliputi kepemimpinan berorientasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (*IT leadership*) dan rencana pengembangan untuk masa depan (*future development plans*).

b) Teknologi (*Technology*)

Teknologi dalam *e-government readiness* berkaitan dengan kesiapan dalam infrastruktur dan teknologi yang memadai sebagai langkah dalam pengembangan dan penerapan *digital governance*. Teknologi dimanfaatkan penggunaannya dalam memperoleh informasi dari aspek pengumpulan, pemrosesan, penggunaan, integrasi, dan berbagi data melalui layanan berbasis digitalisasi (Saptadi *et al.*, 2020). Teknologi ini meliputi empat tingkatan penerapan, meliputi infrastruktur komunikasi dan informasi dasar (*communication and basic information structure*), infrastruktur layanan elektronik Teknologi Informasi dan Komunikasi (*ICT e-service infrastructure*), penyediaan TIK (*ICT provisioning*), dan dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (*ICT support*).

c) Organisasi (*Organization*)

Konteks organisasi didasarkan pada penyediaan produk TI (teknologi informasi) atau layanan daring yang digunakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Aspek organisasi ini berkaitan dengan pengintegrasian peraturan organisasi dengan manajemen TIK (Ulya, 2020). Indikator organisasi memiliki tiga tingkatan dalam mencapai *digital governance*, meliputi organisasi yang memproduksi dan menggunakan teknologi informasi, organisasi yang memproduksi dan menggunakan infrastruktur komunikasi dan layanan internet dasar, serta organisasi yang memproduksi dan menggunakan layanan internet tingkat lanjut, termasuk penerapan *e-government*. Adapun sub-indikator organisasi

diantaranya yaitu peraturan Teknologi Informasi dan Komunikasi (*ICT regulations*), kerja sama Teknologi Informasi dan Komunikasi (*ICT cooperation*), dan manajemen Teknologi Informasi dan Komunikasi (*ICT management*).

d) Sumber Daya Manusia (*People*)

Sumber daya manusia menjadi salah satu domain penting dalam penilaian *e-readiness* karena tingkat kecanggihan penerapan *digital governance* dipengaruhi oleh sumber daya aparatur maupun pimpinan di pemerintahan. Sumber daya manusia pada organisasi pemerintah meliputi staf dan pengguna teknologi informasi, serta para regulator dan implementor di pemerintahan. Indikator sumber daya manusia berkaitan dengan keterlibatan aktor dalam organisasi yang berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, motivasi sumber daya manusia dalam menerima transformasi perubahan (Hikmah *et al.*, 2022). Adapun sub-indikator pada sumber daya manusia yaitu kesadaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (*ICT awareness*), pendidikan dan pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi (*ICT education and training*), keterampilan dan pekerjaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (*ICT skills and jobs*), dan manajemen keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (*Management of ICT skills*).

e) Lingkungan (*Environment*)

Lingkungan menjadi salah satu komponen penting dalam penilaian kesiapan penerapan teknologi dengan mengidentifikasi isu-isu non-TIK yang memengaruhi status TIK. Aspek yang terkait dengan kesiapan pemerintahan elektronik meliputi berbagai komponen dalam lingkungan kebijakan yang mempengaruhi sektor TIK dan penggunaan TIK (Nugroho, 2020). Adapun sub-indikator lingkungan meliputi pengetahuan (*knowledge*), infrastruktur umum (*general infrastructure*),

manajemen sumber daya dan ekonomi (*resources and economy*), dan manajemen organisasi (*organization*).

Berdasarkan tinjauan mengenai model-model kesiapan pemerintahan berbasis elektronik, maka penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan model *E-Readiness Framework* STOPE yang dikembangkan Al-Osaimi *et al.* (2008) dengan meninjau meninjau lima indikator, yaitu indikator strategi (*strategy*) yang mengidentifikasi faktor penting pada kesiapan digitalisasi di pemerintahan, indikator teknologi (*technology*) yang mengidentifikasi kesiapan dalam infrastruktur dan teknologi yang memadai dalam upaya pengembangan dan penerapan *digital governance*, indikator organisasi (*organization*) didasarkan pada konteks penyediaan produk teknologi informasi atau layanan digital yang digunakan oleh pemerintah maupun masyarakat, indikator sumber daya manusia (*people*) berkaitan dengan kesiapan mengenai kesadaran, pendidikan dan pelatihan, keterampilan dan pekerjaan, serta manajemen keterampilan teknologi informasi dan komunikasi, dan indikator lingkungan (*environment*) berkaitan penilaian kesiapan penerapan teknologi dengan mengidentifikasi isu-isu non-TIK yang memengaruhi status TIK. Teori ini dipilih atas dasar pengidentifikasian tiap indikator yang lebih lengkap dibandingkan teori lainnya. Melalui analisis yang lebih lengkap, maka hal ini dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif terkait kesiapan *digital governance* pada pemerintah daerah Provinsi Lampung dalam pengembangan *smart province*.

2.4.3 Peran Kesiapan Pemerintahan Berbasis Elektronik (*E-Government Readiness*)

Menurut Nugroho (2020) penilaian terhadap *e-readiness* pemerintah adalah untuk melihat sejauh mana *e-government* telah sesuai dengan perencanaan awal dan dapat dijadikan patokan dalam menilai kesiapan sebuah institusi dalam mengimplementasikan *digital governance*.

Kesiapan pemerintahan berbasis elektronik (*e-government readiness*) berperan dalam menilai tingkat kesiapan pemerintah dalam mengidentifikasi isu atau permasalahan untuk merumuskan alternatif kebijakan yang tepat dan mencapai keberhasilan kebijakan dalam penerapan pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) sesuai dengan tingkat kesiapannya dan berdasarkan pada hal-hal yang memadai dalam suatu organisasi pemerintah (Nugroho & Purbokusumo, 2020). Adapun peran penting *e-government readiness* di antaranya yaitu:

1. Penilaian terhadap *e-government readiness* dapat berguna untuk memahami dan mengidentifikasi peluang-peluang yang penting dan relevan untuk pembangunan dalam pemanfaatan TIK (teknologi informasi dan komunikasi).
2. Penilaian terhadap *e-government readiness* dapat memungkinkan pemerintah untuk menetapkan, mengukur, dan mencapai tujuan penerapan *digital governance*.
3. Pengembangan dan penilaian *e-government readiness* sangat penting untuk mendapatkan hasil yang dapat digunakan untuk mempercepat tindakan, meningkatkan daya saing global, dan menggunakan sumber daya yang terbatas secara lebih baik.
4. Penilaian *e-government readiness* dapat membantu *stakeholders* dalam membuat keputusan yang sulit untuk menggunakan sumber daya yang langka dan mengubah kekuatan yang ada menjadi anggaran pendapatan baru.
5. Penilaian *e-government readiness* dapat mengungkapkan hambatan mana yang sepadan dengan investasi waktu dan dana perlu dikorbankan dan mana yang perlu diatasi.
6. Penilaian *e-government readiness* yang disusun dengan baik akan dapat memetakan posisi dan kondisi suatu negara, wilayah atau daerah dan meningkatkan kekuatan kompetitif dan mempromosikan bidang-bidang suatu daerah memiliki keunggulan dibandingkan dengan daerah lainnya.

2.5 Tinjauan Tentang *Smart Province*

2.5.1 Konsep *Smart Province*

Cohen (2015) mengungkapkan bahwa kota cerdas (*smart city*) merupakan kota berwawasan masa depan yang dibangun atas kombinasi ‘cerdas’ melalui berbagai komponen yang mampu mengambil keputusan secara mandiri dengan mengadaptasi teknologi. Sementara itu, *smart city* dalam Purwanti (2017) merupakan kota yang menggunakan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengatasi berbagai permasalahan perkotaan yang dialami. Berdasarkan definisi tersebut, maka *smart city* merupakan kota yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan secara efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan wilayahnya.

Smart province merupakan bentuk pengembangan dari konsep *smart city* di Indonesia. *Smart province* ini merupakan bagian dari upaya untuk mencapai Indonesia Cerdas (*Smart Indonesia*) yang menjadi amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. *Smart province* ini dikembangkan sebagai langkah untuk membangun *digital governance* dalam membantu proses manajemen dan integrasi data untuk mendukung pengambilan kebijakan yang tepat sasaran. Pemanfaatan teknologi sebagai upaya dalam pengembangan potensi dan tata kelola di wilayah provinsi akan mampu memberikan upaya pemerataan terhadap daerah kabupaten/kota dalam akses terhadap berbagai komponen pembentuk *smart province*.

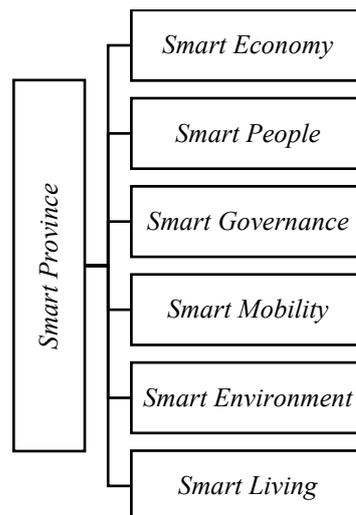
Untuk mengimplementasikan TIK, berbagai aspek harus dipersiapkan dengan matang. Dalam hal penerapan TIK dalam organisasi, faktor sosial dan budaya juga harus diperhatikan. Sementara itu, komponen utama yang harus dipertimbangkan ketika menyiapkan inisiatif TIK: (1) Sumber daya manusia, yang mencakup jumlah dan kualitas sumber daya manusia; (2) Teknologi, yang mencakup infrastruktur fisik, digital, atau TIK, dan infrastruktur sosial untuk kepentingan publik; dan (3) Tata kelola, yang mencakup hukum, lembaga, dan prosedur yang digunakan

untuk mengimplementasikan pengembangan *smart province* (Damanik, 2019).

Pencapaian yang proporsional dari persyaratan ini menentukan kesiapan program *smart province*. Ketika mengimplementasikan *smart province*, ketiga faktor yang telah disebutkan sebelumnya perlu didistribusikan secara bijak untuk memenuhi kebutuhan ekosistem TIK. Oleh karena itu, untuk menentukan hal tersebut, diperlukan investigasi yang komprehensif untuk mengevaluasi kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan proyek *smart province*. Memahami kondisi kesiapan pemerintah daerah sangat membantu dalam menetapkan standar implementasi dan mengidentifikasi kekurangan dan kelemahan saat ini sehingga persyaratan kesiapan elektronik dapat dipenuhi sebaik mungkin.

2.5.2 Komponen Pembentuk *Smart Province*

Dengan mempertimbangkan kota dan kabupaten sebagai komponen dari *smart province*, sebuah provinsi terdiri dari kota dan kabupaten yang dipandang sebagai 'city', kesiapan daerah ditunjukkan dengan deskripsi kematangan komponen-komponen tata kelola pemerintahan, infrastruktur TIK, dan layanan/aplikasi yang diadopsi dari model kota cerdas.



Gambar 5. Komponen Pembentuk *Smart City* (Cohen, 2015)

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2024)

Cohen (2015) mengemukakan terdapat enam indikator pembentuk *smart city* yang juga menjadi komponen dalam pembentuk *smart province*, yaitu:

1. Ekonomi Cerdas (*Smart Economy*)

Ekonomi cerdas (*smart economy*) ini berkaitan dengan faktor-faktor pada daya saing ekonomi seperti inovasi, kewirausahaan, merek dagang, produktivitas dan fleksibilitas pasar tenaga kerja, serta integrasi di pasar internasional. Menurut Purwanti (2017) ekonomi cerdas (*smart economy*) dapat tercapai apabila tingkat perkenomian dan kesejahteraan finansial masyarakat menjadi tinggi, serta diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pendapatan perkapita yang tinggi.

2. Masyarakat Cerdas (*Smart People*)

Masyarakat cerdas atau *smart people* berkaitan dengan kualitas interaksi sosial masyarakat dalam hal integrasi dan keterbukaan terhadap kehidupan publik yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada pendidikan masyarakat saja. Masyarakat cerdas (*smart people*) ini juga berkaitan dengan modal masyarakat yang tereduksi baik secara formal maupun non-formal sehingga dapat terwujud individu dan komunitas masyarakat yang berkualitas baik.

3. Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (*Smart Governance*)

Tata kelola pemerintahan yang cerdas (*smart governance*) mencakup aspek partisipasi politik dan layanan publik bagi masyarakat, serta pelaksanaan fungsi administrasi melalui pengintegrasian terhadap teknologi informasi dan komunikasi.

4. Mobilitas Cerdas (*Smart Mobility*)

Mobilitas cerdas atau *smart mobility* berkaitan dengan aksesibilitas lokal dan internasional meliputi ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi, serta sistem transportasi modern dan berkelanjutan.

5. Lingkungan Cerdas (*Smart Environment*)

Lingkungan cerdas atau *smart environment* dalam konteks ini merupakan lingkungan yang bersifat keberlanjutan baik fisik

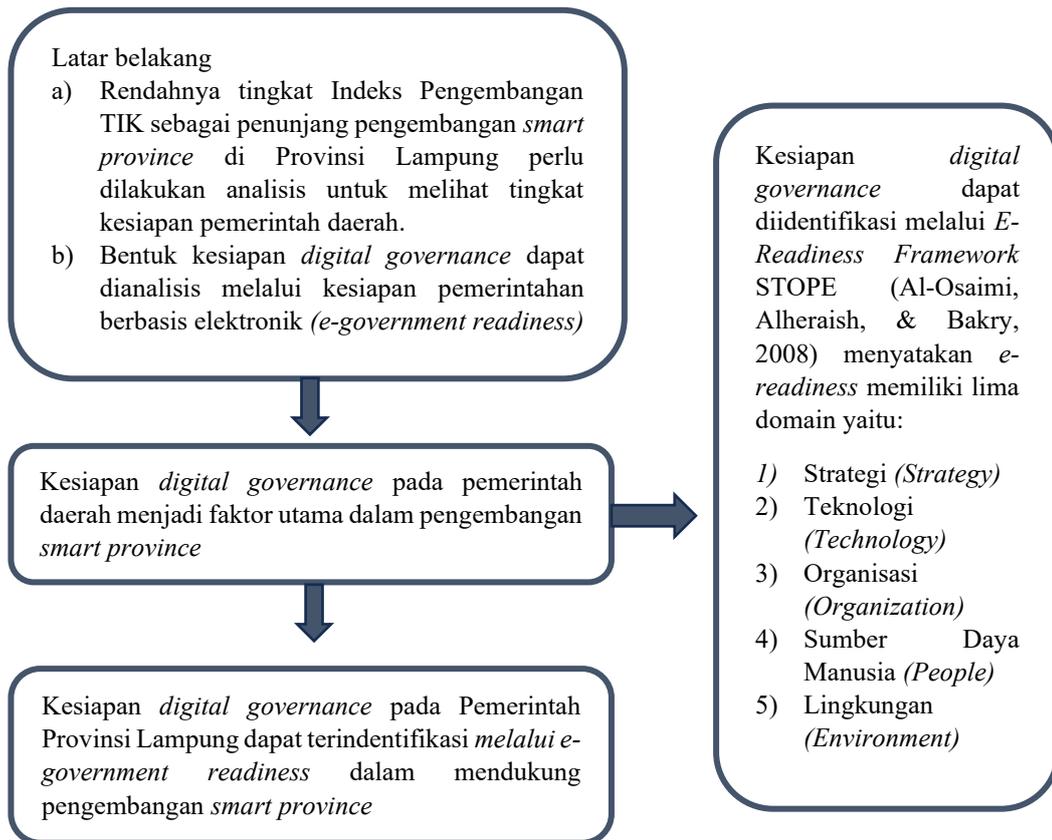
maupun non-fisik, seperti pengelolaan sumber daya dan upaya terhadap perlindungan lingkungan.

6. Kehidupan Cerdas (*Smart Living*)

Kehidupan yang cerdas atau *smart living* mengacu terhadap tercapainya kualitas hidup dengan tersedianya kebutuhan masyarakat, serta terakomodasinya aspek-aspek dalam kebudayaan masyarakat.

2.6 Kerangka Berpikir Penelitian

Kerangka pikir penelitian merupakan sebuah gambaran dari konsep yang akan menjelaskan mengenai masalah yang akan dibahas dalam penelitian dan menjadi acuan bagi peneliti untuk membuat batasan terhadap proses penelitian agar dapat memfokuskan aspek masalah yang akan diteliti. Dasar pemikiran yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini merujuk pada kesiapan *digital governance* dengan mengidentifikasinya melalui *E-Readiness Framework* STOPE yang meliputi strategi (*strategy*), teknologi (*technology*), organisasi (*organization*), sumber daya manusia (*people*), dan lingkungan (*environment*). Domain-domain tersebut digunakan untuk menganalisis apakah penerapan *digital governance* pada pemerintahan daerah telah siap untuk dapat diterapkan melalui penilaian terhadap kesiapan pemerintahan berbasis elektronik (*e-government readiness*) sebagai upaya dalam pengembangan *smart province* di Provinsi Lampung.



Gambar 6. Kerangka Pikir Penelitian

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2024)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Creswell & Creswell (2018) metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai jenis pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami situasi atau fenomena sosial, peristiwa, individu, kelompok maupun interaksi tertentu dengan cara mengontraskan, membandingkan, mereplikasi, mengelompokkan dan/atau mengklasifikasikan objek penelitian. Selain itu, menurut Miles *et al.* (2014), penelitian kualitatif merupakan metode penelitian dengan melakukan kontak intens dan/atau berkepanjangan dengan partisipan untuk menyelidiki kehidupan sehari-hari dan/atau aktivitas khusus dari individu, kelompok, masyarakat, dan organisasi secara sistematis, menyeluruh, dan terpadu.

Murdiyanto (2020) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang holistik, kompleks, dan rinci. Sehingga, penelitian kualitatif bersifat deskriptif menggunakan analisis yang cenderung induktif, yaitu dengan melakukan penyusunan konstruksi teori untuk mengungkapkan fakta penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif karena peneliti berupaya memahami fenomena yang dijadikan sebagai topik penelitian secara lebih mendalam terkait dengan kesiapan *digital governance* pada pemerintah daerah dengan menggunakan alat analisis *e-readiness* dalam menganalisis kesiapan pemerintahan berbasis elektronik (*e-government readiness*) dalam pengembangan *smart province* di Provinsi Lampung melalui data dan fakta yang didapatkan di lapangan melalui proses penelitian. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* (pemilihan berdasarkan kriteria tertentu) di mana pemilihan lokasi

didasarkan pada tupoksi instansi di Pemerintahan Provinsi Lampung sebagai koordinator (*leading sector*) dalam pengembangan *smart province*.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini bertujuan untuk memberikan batasan-batasan yang akan diteliti dan mengetahui data-data yang relevan bagi peneliti agar mendapatkan hasil yang diinginkan dari permasalahan yang diteliti. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu:

1. Penilaian kesiapan pemerintahan berbasis elektronik (*e-government readiness*) dalam penerapan tata kelola pemerintahan digital (*digital governance*) pada pemerintah daerah untuk pengembangan *smart province* di Provinsi Lampung melalui analisis *E-Readiness Framework* STOPE yang dikembangkan oleh Al-Osaimi *et al.* (2008) melalui lima domain yang dianalisis Nugroho (2020), meliputi:

- 1) Strategi (*Strategy*)

Peneliti menganalisis kesiapan strategi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Lampung melalui 2 domain strategi, yaitu ditinjau dari:

- a. Kepemimpinan berorientasi Teknologi Informasi (*IT Leadership*): adanya arahan atau inisiatif pemimpin, dukungan dari pemerintah, keterlibatan dan pengaruh pimpinan berbasis IT.
- b. Rencana Pengembangan untuk Masa Depan (*Future Development Plans*): kesiapan dalam hal perencanaan pemenuhan infrastruktur TIK dasar, rencana kerjasama dalam bidang TIK, perencanaan pada sumber daya manusia berbasis TIK, dan perencanaan diluar TIK sebagai penunjang *smart province*.

- 2) Teknologi (*Technology*)

Peneliti melihat kesiapan pada aspek teknologi yang dimiliki oleh Pemerintah dalam mengembangkan *smart province* di Provinsi Lampung yang dilihat melalui beberapa sub-domain, yaitu:

- a. Infrastruktur Teknologi Komunikasi dan Informasi Dasar (*ICT Basic Infrastructure*): kesiapan dalam aspek ketersediaan teknologi dan infrastruktur dasar, serta kualitas atau kinerja TIK.

- b. Infrastruktur Layanan Elektronik Teknologi Informasi dan Komunikasi (*ICT e-Service Infrastructure*): kesiapan dalam aspek ketersediaan portal dan web *e-government*, ketersediaan aplikasi dan layanan berbasis *online*.
 - c. Penyediaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (*ICT Provisioning*): kesiapan dalam aspek ketersediaan perangkat keras dan lunak, serta perlindungan keamanan jaringan/data.
 - d. Dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (*ICT Support*): kesiapan dalam aspek ketersediaan dan penggunaan standar pengelolaan dan pemanfaatan TIK, memiliki dan menggunakan standar/perlindungan keamanan jaringan/data, serta ketersediaan unit dan *maintenance*.
- 3) Organisasi (*Organization*)
- Peneliti meninjau kesiapan pada aspek organisasi yang dimiliki oleh Pemerintah dalam mengembangkan *smart province* di Provinsi Lampung yang dilihat melalui beberapa sub-domain, yaitu:
- a. Regulasi Pemerintah TIK (*ICT Government Regulation*): kesiapan dalam aspek ketersediaan regulasi *e-government*, adaptasi standar teknik TIK, regulasi keamanan informasi, regulasi layanan internet, otorisasi *internet service provider*, regulasi layanan *government to business*.
 - b. Kerjasama TIK (*ICT Cooperation*): adanya kerjasama dengan berbagai pihak seperti industri swasta, sektor pendidikan dan penelitian, dan sektor profesional dalam hal berbagi pengetahuan dan pengalaman yang bertujuan untuk inovasi TIK.
 - c. Manajemen TIK (*ICT Management*): adanya penilaian berkala yang bertujuan untuk evaluasi, fleksibel, dan mudah beradaptasi agar layanan yang dihasilkan dapat tepat waktu dan berkualitas, menggunakan teknik yang modern terhadap pemanfaatan TIK, biaya fasilitas TIK dan akses serta biaya pemeliharaan sehubungan dengan manfaat yang diperoleh.

4) Sumber Daya Manusia (*People*)

Peneliti meninjau kesiapan pada aspek sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pemerintah dalam mengembangkan *smart province* di Provinsi Lampung yang dilihat melalui beberapa sub-domain, yaitu:

- a. Kesadaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (*ICT Awareness*): adanya literasi TIK, dukungan sistem pendidikan TIK, dan dukungan media
- b. Pelatihan dan Pendidikan TIK (*ICT Education and Training*): kualifikasi pendidikan dan keterampilan berbasis TIK, serta pelatihan khusus TIK terhadap aparatur.
- c. Pekerjaan dan Kualifikasi TIK (*ICT Qualification and Jobs*): kesesuaian keterampilan TIK pada pekerjaan, ketersediaan dan kebutuhan keterampilan TIK, dan kualifikasi pendidikan TIK pada jabatan tertentu.
- d. Manajemen Keterampilan TIK (*Management of ICT Skilled*): memiliki keterampilan dan kinerja TIK berbasis produktivitas oleh aparatur.

5) Lingkungan (*Environment*)

Peneliti meninjau kesiapan pada domain lingkungan yang dimiliki oleh Pemerintah dalam mengembangkan *smart province* di Provinsi Lampung yang dilihat melalui beberapa sub-domain, yaitu:

- a. Pengetahuan (*Knowledge*): adanya budaya dan dukungan kualitas sistem pendidikan, penelitian, dan pengembangan.
- b. Sumber daya dan Ekonomi (*Resource and Economy*): adanya dampak penerapan TIK terhadap perekonomian daerah.
- c. Pengoorganisasian (*Organization*): adanya kepatuhan terhadap aturan, kerjasama terhadap pihak lokal, nasional, dan internasional, dampak budaya di tempat kerja, serta penerimaan dan tanggapan terhadap budaya teknologi.
- d. Infrastruktur Umum (*General Infrastructure*): adanya akses terhadap fasilitas umum dasar berbasis teknologi, seperti instalasi listrik, transportasi, sistem pos, maupun pelayanan kesehatan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penilaian mengenai kesiapan pemerintahan berbasis elektronik (*e-government readiness*) dalam

konteks pengembangan *smart province* di Provinsi Lampung melalui instansi yang berkaitan.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini merujuk pada tempat di mana peneliti melakukan penelitian secara langsung untuk mengamati fenomena atau peristiwa yang sedang dipelajari, sehingga peneliti dapat mengumpulkan gambaran, data, dan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Dalam hal ini, lokasi penelitian yang dipilih adalah Pemerintah Provinsi Lampung tepatnya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada tugas dan tanggung jawab Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, bidang persandian dan bidang statistik berdasarkan asas otonomi, serta sebagai koordinator (*leading sector*) *smart province* di Provinsi Lampung.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan merupakan data yang bersumber dari subjek penelitian sekaligus mencerminkan objek penelitian. Data perlu merepresentasikan fenomena yang akan dijelaskan atau digambarkan dan dapat digunakan untuk penelitian saat ini. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagaimana yang dikemukakan oleh Samsu (2021), yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang dilakukan melalui wawancara kepada informan. Dalam penelitian ini, data yang akan dianalisis peneliti diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, beberapa informan Diskominfo kabupaten/kota, serta masyarakat umum.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua secara tidak langsung, yang dapat digunakan untuk memperkaya data dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data pendukung diperoleh melalui berbagai literatur yang ada seperti buku, jurnal atau artikel ilmiah, dokumen-dokumen yang didapat melalui lokasi penelitian, maupun dokumen lainnya yang berkaitan dengan kesiapan *digital governance* oleh pemerintah daerah dalam pengembangan *smart province*.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Murdiyanto (2020), terdapat beberapa teknik atau metode dalam pengumpulan data pada penelitian kualitatif, diantaranya yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan *Focus Group Discussion* (FGD). Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan untuk menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data yang melibatkan komunikasi berupa percakapan langsung yang dilakukan oleh dua pihak. Tahapan ini dilakukan antara pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan pihak terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Tujuan dari dilakukannya wawancara adalah untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diamati atau diperoleh dengan alat lain. Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*). Kriteria informan dalam penelitian ini didasarkan pada tupoksi dan peran masing-masing yang terkait dengan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan secara khusus terkait dengan *smart province* di Provinsi Lampung.

Tabel 4. Daftar Informan Penelitian

No.	Daftar Informan	Informasi yang didapat
1.	Muhammad Yusuf Nasution (Fungsional Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Provinsi Lampung)	Mengenai dukungan dan strategi Bappeda Provinsi Lampung sebagai Wali Data Pendukung Satu Data Lampung dalam penerapan SPBE.
2.	Kepala UPTD Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Mengenai perencanaan pengintegrasian layanan publik digital di Provinsi Lampung sebagai salah satu program Gubernur dalam menciptakan Lampung <i>Smart Province</i> .
3.	Ayuna Kintani, S.T. (Sistem Analis Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung)	Mengenai kesiapan pemerintahan berbasis elektronik (<i>e-government readiness</i>) pada pemerintah daerah melalui Diskominfo dalam pengembangan <i>smart province</i> di Provinsi Lampung.
4.	Fachrizal, S.Kom., M.Kom. (Kepala Bidang Pemberdayaan E-Government Diskominfo Kota Bandar Lampung)	Mengenai dukungan Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Diskominfo dalam mendukung <i>smart province</i> di Provinsi Lampung.
5.	Andi Setiyono, S.T. (Kepala Bidang Informatika dan Statistik Diskominfo Kota Metro)	Mengenai dukungan Pemerintah Kota Metro melalui Diskominfo dalam mendukung <i>smart province</i> di Provinsi Lampung.
6.	Delfarizi, S.E., MM. (Kepala Bidang Tata Kelola SPBE Diskominfo Kabupaten Lampung Selatan)	Mengenai dukungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melalui Diskominfo dalam mendukung <i>smart province</i> di Provinsi Lampung.
7.	Ibu Agustina (Pedagang Warung – Pengguna SIGAP Lampung)	Mengenai pendapat atau perspektif masyarakat selaku pengguna layanan <i>online</i> Pemerintah Provinsi Lampung
8.	Bapak Agung Ganef Kartika (Masyarakat Umum – Pengguna e-PKB Bapenda Lampung)	Mengenai pendapat atau perspektif masyarakat selaku pengguna layanan <i>online</i> Pemerintah Provinsi Lampung

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2024)

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu bagian dalam teknik pengumpulan data dengan memperoleh data melalui catatan-catatan dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dikaji. Dokumentasi ini merupakan metode dalam mengumpulkan data dari sumber yang dianggap akurat sebagai cerminan situasi atau kondisi yang sebenarnya terjadi, dan dapat

dianalisis secara berulang-ulang tanpa mengalami perubahan. Adapun dokumen yang dijadikan sebagai pelengkap dan acuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 5. Daftar Dokumen Terkait Penelitian

No.	Dokumen	Data yang didapat
1.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018	Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
2.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023	Tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional
3.	Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2020	Tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Lampung
4.	Roadmap SPBE Provinsi Lampung Tahun 2021—2025	Peta rencana umum pengembangan SPBE di Provinsi Lampung tahun 2021—2025
5.	Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Khusus di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	Standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus yang diterapkan untuk seluruh OPD dan kabupaten/kota.
6.	Pedoman Manajemen TIK Provinsi Lampung	Dasar dalam manajemen data, manajemen risiko, dan manajemen keamanan informasi yang diterapkan kepada seluruh instansi di Provinsi Lampung

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2024)

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Samsu (2021), analisis data merupakan proses interpretasi informasi yang didapatkan melalui penelitian lapangan. Tahap analisis data ini bertujuan untuk menggambarkan data secara naratif, deskriptif, maupun tabulasi berdasarkan data yang telah diperoleh. Dari proses analisis tersebut, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan penelitian. Proses ini memerlukan alat analisis yang tepat, karena hal tersebut akan mempengaruhi cara menganalisis dan menjelaskan data, sehingga temuan penelitian mampu dipahami secara mendalam. Analisis data meliputi proses kategorisasi, penataan, manipulasi, peringkasan data untuk dapat dihasilkan kesimpulan dan mendukung keputusan yang diambil oleh peneliti. Miles *et al.* (2014) mengklasifikasikan teknik dalam analisis data kualitatif melalui teknik analisis data mengalir (*flow chart analysis*), meliputi:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Tahap reduksi data menjadi tahap dalam menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, serta mentransformasikan data yang

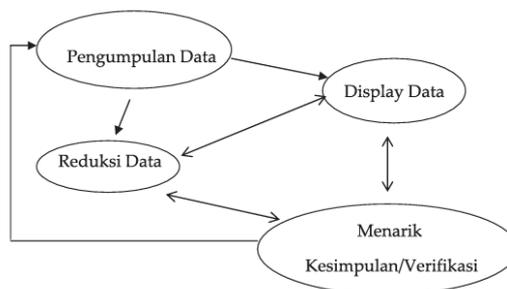
muncul dalam proses catatan lapangan. Reduksi data ini dilakukan dengan mengeliminasi data yang tidak diperlukan dan mengorganisasikan data melalui penggambaran dan verifikasi kesimpulan akhir. Pada tahap ini, kegiatan pengorganisasian data dapat membantu memudahkan peneliti untuk melakukan proses analisis data berikutnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Tahapan berikutnya dalam analisis data adalah penyajian atau menampilkan data. Tahap penyajian data merupakan proses merangkai informasi yang telah terorganisir dalam upaya untuk memberikan gambaran kesimpulan dan mengambil tindakan atau keputusan. Sehingga, penyajian data berkaitan dengan upaya peneliti untuk mendapatkan gambaran maupun penafsiran berdasarkan data yang telah diperoleh serta korelasinya dengan fokus penelitian yang dilakukan. Penyajian data dapat dilakukan melalui matriks, grafik, tabel, dan sebagainya.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion/Verification*)

Tahapan terakhir dalam analisis data adalah verifikasi atau pembuatan/penarikan kesimpulan. Tahapan ini merupakan kegiatan perumusan kesimpulan penelitian, baik kesimpulan yang bersifat sementara yaitu kesimpulan yang ditemukan pada saat penelitian sedang berlangsung maupun kesimpulan akhir yaitu kesimpulan yang dibuat setelah seluruh data penelitian telah dianalisis. Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan aktivitas analisis, di mana pada awal pengumpulan data, peneliti mulai memutuskan apakah sesuatu memiliki makna atau tidak dalam keteraturan, pola, penjelasan, kemungkinan konfigurasi, hubungan sebab-akibat, dan proposisi. Meskipun demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif perlu dipahami dalam prosesnya, sebab masalah dan rumusan masalah bersifat dinamis dan dapat berkembang.



Gambar 7. Komponen *Flow Chart Analysis Miles dan Huberman*

Sumber: (Miles et al., 2014)

3.7 Teknik Keabsahan Data

Murdiyanto (2020) mengungkapkan bahwa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas atau *credibility* (derajat kepercayaan), transferabilitas atau *transferability* (kesepakatan), dependabilitas atau *dependability* (reliabilitas), dan konfirmabilitas atau *confirmability* (kepastian). Adapun penjelasan mengenai uji keabsahan data yaitu sebagai berikut:

1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian dapat dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu memperpanjang pengamatan, meningkatkan ketelitian, triangulasi, menganalisis kasus negatif, menggunakan referensi, serta melakukan *member-check*. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan pengujian kredibilitas melalui teknik triangulasi. Triangulasi dalam uji kredibilitas dapat dipahami sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan beragam cara dan waktu. Terdapat tiga jenis triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teknik data untuk menguji kredibilitas data dengan melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, serta triangulasi sumber dengan mengonfirmasi temuan dengan informan yang berbeda, melalui metode pengumpulan data, yaitu wawancara dan dokumentasi yang

kemudian dibandingkan dan dikonfirmasi temuan melalui berbagai metode tersebut.

2. Uji Transferabilitas (*Transferability*)

Uji *transferability* merupakan proses validitas eksternal yang berkaitan dengan tingkatan atau derajat kesepakatan. Oleh karena itu, agar hasil penelitian dapat dipahami oleh orang lain, maka peneliti perlu membuat laporan dengan menguraikan secara rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Apabila pembaca dapat memperoleh dengan jelas mengenai gambaran hasil penelitian tersebut, maka laporan penelitian dapat memenuhi standar *transferability*.

Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan kesiapan pemerintahan berbasis elektronik (*e-government readiness*) oleh pemerintah daerah dalam pengembangan *smart province* di Provinsi Lampung agar pembaca yang ingin melakukan penelitian serupa dapat membandingkan kondisi, serta menilai apakah hasil penelitian yang dilakukan ini dapat diterapkan di tempat lain atau tidak.

3. Uji Dependabilitas (*Dependability*)

Pada penelitian kualitatif, uji dependabilitas dilakukan melalui audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Pengujian ini dilakukan dengan mengaudit kembali proses penelitian dimulai dari penentuan masalah/fokus penelitian, melakukan analisis lapangan, menentukan sumber daya, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, hingga pada tahap penarikan kesimpulan. Pada konteks penelitian ini, uji dependabilitas dilakukan dengan penyampaian kebenaran terkait kegiatan yang dilakukan selama proses penelitian untuk dilakukan pemeriksaan oleh dosen pembimbing dengan menyertakan bukti-bukti pendukung.

4. Uji Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Uji konfirmabilitas diartikan sebagai pengujian hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Hasil penelitian berkaitan dengan proses penelitian yang dilakukan, sehingga antara proses dengan hasil perlu saling memiliki keterkaitan agar penelitian yang dilakukan mampu memenuhi standar *confirmability*. Pada konteks penelitian ini, peneliti

melakukan pengujian konfirmabilitas dengan mempresentasikan hasil penelitian kepada dosen pembimbing dan penguji terkait dengan analisis kesiapan *digital governance* pada pemerintah daerah melalui *e-readiness framework* STOPE dalam pengembangan *smart province* di Provinsi Lampung.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah di Provinsi Lampung telah menunjukkan kesiapan yang baik, namun masih dihadapi beberapa tantangan pada tiap domain yang mengindikasikan belum sepenuhnya mencapai keidealan kesiapan elektronik (*e-readiness*) pada pemerintahan sebagaimana yang dijelaskan sebagaimana berikut:

1) Strategi (*Strategy*)

Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan kepemimpinan daerah melalui koordinasi terhadap perangkat daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui rapat koordinasi, sosialisasi, ataupun bimbingan teknis. Selain itu, Pemprov Lampung juga telah memiliki arah strategis dalam pengembangan *smart province* melalui pemerataan kebijakan *smart city* dan penyusunan *roadmap* SPBE 2021–2025. Meskipun demikian, implementasi kebijakan *smart city* sebagai pendukung *smart province* belum merata di seluruh daerah, serta masih adanya kelemahan pada aspek komitmen pemimpin daerah dalam mendukung transformasi digital secara menyeluruh. Kepemimpinan berorientasi TIK dan perencanaan berbasis jangka panjang belum sepenuhnya sesuai sebagaimana penerapan di Provinsi Lampung.

2) Teknologi (*Technology*)

Kesiapan Pemerintah Provinsi Lampung pada infrastruktur teknologi dasar sudah cukup baik, dengan telah tersedia server mandiri, tenaga ahli, dan pengelolaan manajemen aset serta perlindungan keamanan data. Selain itu, telah tersedia portal pengintegrasian layanan digital pemerintah yang mencakup layanan pemerintahan dan layanan publik. Akan tetapi, masih terdapat tantangan dalam interoperabilitas sistem antar tingkatan pemerintahan secara menyeluruh, serta pemerataan jaringan di seluruh daerah. Secara umum,

kesiapan pada aspek teknologi telah menunjukkan perkembangan yang baik terutama pada infrastruktur dasar, layanan elektronik, penyediaan TIK, dan dukungan TIK, namun masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan belum maksimalnya kesiapan teknologi Provinsi Lampung.

3) Organisasi (*Organization*)

Domain organisasi pada kesiapan Pemerintah Provinsi Lampung telah terpenuhi dalam aspek regulasi *e-government* dengan mengacu pada kebijakan nasional dan diperkuat melalui peraturan daerah. Upaya kerja sama dengan akademisi dan pemerintah di tingkat pusat dan daerah (kabupaten/kota) juga telah dilakukan melalui koordinasi atau nota kesepakatan (*Memorandum of Understanding/MoU*). Pelaksanaan evaluasi manajemen TIK juga dilakukan melalui sistem digital untuk memastikan aktivitas terpantau dan terlaksana dengan baik. Tetapi masih ditemukan kelemahan dalam koordinasi antar perangkat daerah sehingga masih terjadi tumpang tindih aplikasi, serta belum menyeluruhnya penerapan pedoman manajemen TIK.

4) Sumber Daya Manusia (*People*)

Pada domain sumber daya manusia, kesadaran TIK diwujudkan melalui sosialisasi literasi TIK yang dilakukan secara rutin dan pelatihan yang diberikan oleh BPSDM. Selain itu, dalam meninjau kesesuaian pekerjaan dan kinerja aparatur, pemerintah daerah menerapkan sistem penilaian melalui e-Kinerja. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan penyesuaian ASN lama dengan latar belakang pendidikan yang berbeda terhadap beban pekerjaan, serta masih terbatasnya pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah menyebabkan ketidakmerataan kemampuan berbasis teknologi pada aparatur.

5) Lingkungan (*Environment*)

Domain lingkungan pendukung telah menunjukkan perkembangan yang baik dengan adanya koordinasi dalam pelatihan TIK dan upaya dalam meningkatkan literasi digital masyarakat. Selain itu, penerapan TIK juga terlihat berpengaruh signifikan terhadap keberlangsungan pelayanan publik dan aktivitas ekonomi daerah. Budaya kerja digital pun mulai diterima oleh para aparatur perangkat daerah, meskipun terdapat resistensi awal dari beberapa OPD. Selain itu,

infrastruktur umum sudah cukup tersedia, namun belum terdapat penyediaan fasilitas teknologi di ruang publik.

Secara keseluruhan, Provinsi Lampung menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam kesiapan *digital governance* melalui berbagai aspek dalam mendukung pengembangan *smart province*. Pada tiap domain, Pemerintah Provinsi Lampung telah memenuhi berbagai komponen-komponen dalam mencapai kesiapan pemerintahan berbasis elektronik. Akan tetapi, masih terdapat beberapa aspek yang belum mencapai kesesuaiannya seperti pemerataan implementasi kebijakan, koordinasi lintas sektor, kesiapan kuantitas dan kualitas SDM, interoperabilitas keseluruhan layanan elektronik, serta pemerataan infrastruktur teknologi umum. Kesiapan digital pemerintah belum sepenuhnya tercermin pada implementasi yang telah dilakukan. Sehingga, untuk mewujudkan transformasi digital yang efektif sebagai pendukung terwujudnya *smart province* yang optimal, diperlukan penguatan komitmen pemimpin daerah, integrasi sistem lintas daerah dan OPD, peningkatan penguatan kapasitas dan koordinasi sumber daya manusia secara menyeluruh, serta pemerataan akses pelayanan publik digital secara berkelanjutan di seluruh wilayah Provinsi Lampung.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis kesiapan *digital governance* pada pemerintah daerah di Provinsi Lampung dalam mendukung pengembangan *smart province* yang masih memerlukan beberapa perbaikan, maka peneliti memberikan saran untuk mendukung transformasi digital pemerintahan daerah khususnya pada *smart province* agar lebih optimal, yaitu sebagai berikut:

1) Membentuk *Task Force* (Satuan Tugas) Khusus *Smart Province* Provinsi Lampung

Pemerintah Provinsi Lampung perlu menunjuk dan membentuk satuan tugas yang memiliki otoritas strategis lintas OPD untuk memastikan arah digitalisasi pada *smart province* lebih konsisten dan terkoordinasi secara vertikal dan horizontal. Hal ini untuk memastikan keberlanjutan pengembangan *smart province* dapat terlaksana dengan baik.

2) Menyusun dan Menetapkan Arah Kebijakan yang Terstruktur

Pemerintah Provinsi Lampung perlu menyusun dan mengimplementasikan *roadmap* pengembangan arsitektur digital yang terintegrasi secara menyeluruh dengan mewajibkan interoperabilitas sistem informasi antarinstansi dan antar pemerintah kabupaten/kota, serta menetapkan Diskominfo sebagai koordinator utama (*leading sector*) dalam manajemen integrasi dan pengawasan platform digital berbasis arsitektur tunggal Provinsi Lampung. Hal ini bertujuan untuk menghindari pengembangan aplikasi yang sama melalui adopsi satu platform pelayanan yang lebih konsisten.

3) Membangun Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Digital yang Terstruktur dan Berkelanjutan

Strategi pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui penyusunan peta kompetensi ASN berbasis jabatan serta menetapkan standar pelatihan dan sertifikasi digital berbasis jabatan. Selain itu, perlu adanya pelaksanaan pelatihan, sertifikasi, dan pembinaan SDM berbasis digital secara merata di seluruh daerah sesuai dengan perkembangan teknologi yang dihadapi.

4) Mendorong Pemerataan Akses Infrastruktur dan Layanan Digital di Seluruh Wilayah

Pemerintah Provinsi Lampung perlu menyusun kebijakan yang afirmatif terutama pada daerah yang masih terhambat penerapan digitalisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi awal (pemetaan) titik buta jaringan melalui pengalokasian anggaran khusus. Selain itu, pemerintah juga perlu mengupayakan kerja sama dan kolaborasi dengan pihak yang dapat membantu memperluas akses jaringan internet dan infrastruktur dasar TIK, seperti dengan penyedia layanan internet, sektor swasta, atau BUMN. Hal ini untuk menjamin inklusivitas akses digital dan pelayanan publik berbasis teknologi.

5) Mengintegrasikan Indikator Capaian SPBE dengan Indikator Kinerja Utama Daerah

Pemerintah Provinsi Lampung perlu mengintegrasikan indikator capaian SPBE ke dalam indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah agar pelaksanaan SPBE menjadi bagian yang utuh dari sistem perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pembangunan daerah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa

implementasi SPBE belum sepenuhnya terkoordinasi secara strategis antar perangkat daerah, sehingga integrasi diperlukan untuk memastikan arah transformasi digital sejalan dengan tujuan pembangunan daerah berbasis *digital governance*. Selain itu, evaluasi SPBE juga perlu diperkuat dengan indikator-indikator pendukung berbasis TIK yang lebih substantif, serta peningkatan kapasitas tim evaluasi internal agar penilaian tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola dan pelayanan publik yang adaptif terhadap dinamika digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, K. A., Nugroho, L. E., Djunaedi, A., & Widyawan. (2018). Smart City Readiness Based on Smart City Council's Readiness Framework. *International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE)*, 8(1), 271–279. <https://doi.org/10.11591/ijece.v8i1.pp271-279>
- Aida, A. N. (2022). *Budget Issue Brief Politik & Keamanan: Kondisi Infrastruktur TIK dalam Mendukung Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik* (4, Vol. 02).
- Aisyah, D. N., Setiawan, A. H., Lokopessy, A. F., Faradiba, N., Setiaji, S., Manikam, L., & Kozlakidis, Z. (2023). ICT Maturity Assessment at Primary Healthcare Services across 9 Provinces in Indonesia: An Evaluation Study. *JMIR Medical Informatics*.
- Al-Osaimi, K., Alheraish, A., & Bakry, S. H. (2008). STOPE-based Approach for e-Readiness Assessment Case Studies. *International Journal of Network Management*, 18, 65–75. <https://doi.org/10.1002/nem>
- Al Osaimi, M., Alosbhan, N., & Alkhatabi, M. (2025). Enhancing User Experience in E-Government Services: A Study on Service Quality in Saudi Arabia. *Journal of Information Systems Engineering and Management*, 10(22), 254–277.
- Alfarizi, S. H. (2025). *Perbandingan Regulasi Keamanan dan Ketahanan Siber di Indonesia dengan Regulasi Keselamatan Siber di Malaysia*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Alfi, M., Yundari, N. P., & Tsaqif, A. (2023). Analisis Risiko Keamanan Siber dalam Transformasi Digital Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 6(2), 1–11. <https://doi.org/10.7454/jkskn.v6i2.10082>

- Algazo, F. A., Ibrahim, S., & Yusoff, W. S. (2021). Digital Governance Emergence and Importance. *Journal of Information System and Technology Management*, 6(24), 18–26. <https://doi.org/10.35631/jistm.624003>
- Angelidou, M. (2014). Smart City Policies: A Spatial Approach. *Cities*, 41, S3–S11. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2014.06.007>
- Anjani, R. D. (2018). Evaluasi Tingkat Kesiapan Pemerintah Kota Batu Dalam Menerapkan Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government) Dengan Menggunakan ICT Readiness [Universitas Brawijaya]. In *Repository Universitas Brawijaya*. <http://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/4883>
- Aptika.kominfo.go.id. (2022). *Lanjutkan Inovasi Kota Cerdas, Kominfo Usung Smart Province Mulai Tahun Depan*. APTIKA KOMINFO. <https://aptika.kominfo.go.id/2022/10/lanjutkan-inovasi-kota-cerdas-kominfo-usung-smart-province-mulai-tahun-depan/>, diakses pada 16 Agustus 2024.
- Awaludin, L. (2019). Strategi Penguatan Kompetensi SDM Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) dalam Mengoptimalkan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). *Paradigma POLISTAAT Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(2), 118–134. <https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v2i2.2115>
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2022* (Issue 112).
- Bahrawi, B. (2015). Tata Kelola Perencanaan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 18(1), 57–68. <https://doaj.org/article/a0df49280204416597f04f37c00ce4de>
- Bappeda.lampungprov.go.id. (2019). *FGD SMART PROVINCE, SMART VILLAGE, DAN SMART SCHOOL*. Bappeda Provinsi Lampung. <https://bappeda.lampungprov.go.id/detail-post/fgd-smart-province-smart-village-dan-samrt-school>, diakses pada 15 Agustus 2024.
- Basri, M. H. (2024). *Analisis Kesiapan E-Government dalam Mendukung Smart Governance di Kabupaten Polewali Mandar*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

- Branderhorst, E. M., & Ruijer, E. (2024). Digital Leadership in Local Government: an Empirical Study of Dutch City Managers. *Local Government Studies*, 1–24. <https://doi.org/10.1080/03003930.2024.2363368>
- Chipembele, M., & Bwalya, K. J. (2016). Assessing e-Readiness of the Copperbelt University, Zambia: Case Study. *The International Journal of Information and Learning Technology*, 33(5), 1–8. <https://doi.org/10.1108/IJILT-12-2015-0036>
- Cohen, B. (2015). *The Smartest Cities In The World 2015: Methodology*. Fraunhofer FOKUS.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Damanik, M. P. (2019). Sumsel Smart Province: Implementasi Dan Tantangan Kesiapan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 23(2), 195. <https://doi.org/10.31445/jskm.2019.2719>
- Damanik, M. P., & Purwaningsih, E. H. (2018). Kesiapan E-Government Pemerintah Daerah Menuju Pengembangan Smart Province (Studi pada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 22(2), 185. <https://doi.org/10.31445/jskm.2018.220207>
- El-Haddadeh, R. (2020). Digital Innovation Dynamics Influence on Organisational Adoption: The Case of Cloud Computing Services. *Information Systems Frontiers*, 22, 985–999. <https://doi.org/10.1007/s10796-019-09912-2>
- Elayah, M. (2025). Transformative Pathways in Qatar’s E-Government: Integrating Societal Engagement and NGO Partnerships for Sustainable Digital Governance. *Public Administration and Development*, 1–14. <https://doi.org/10.1002/pad.2102>
- Faozanudin, M., Rosyadi, S., & Sulistiani, L. S. (2023). the Preparedness of Village Governments for the Digital Transformation of Public Services in Banyumas Regency, Indonesia. *Public Policy and Administration*, 22(4), 448–462. <https://doi.org/10.13165/VPA-23-22-4-05>
- Febrianty, I., Antoni, D., Syamsuar, D., & Firdaus, A. (2023). Maturity Level Literasi Teknologi, Informasi, Dan Komunikasi (TIK) Pada Tenaga Kesehatan

- Di Puskesmas Kota Palembang. *Jurnal Pengembangan Sistem Informasi Dan Informatika*, 4(3), 9–25. <https://doi.org/10.47747/jpsii.v4i3.1684>
- Fitri, A. A., Ridlwan, Z., & Natamiharja, R. (2024). Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Dengan Prinsip Good Governance. *UNES Law Review*, 6(3), 8412–8424. <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1749>
- Gil-Garcia, J. R., & Pardo, T. A. (2006). Multi-method approaches to digital government research: Value lessons and implementation challenges. *Proceedings of the Annual Hawaii International Conference on System Sciences*, 4. <https://doi.org/10.1109/HICSS.2006.356>
- Grigalashvili, V. (2023). Digital Government and Digital Governance: Grand Concept. *International Journal of Scientific and Management Research*, 06(02), 1–25. <https://doi.org/10.37502/ijsmr.2023.6201>
- Hansiden, P. E. (2024). *Governansi Digital*. Penerbit Tahta Media Group.
- Hartati, C. S., & Muhammad, A. (2023). Combating Cybercrime and Cyberterrorism in Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 11(2), 45–56. <https://doi.org/10.18196/jhi.v11i2.15647>
- Herawati, M., & Djunaedi, A. (2020). Ketersediaan Data dalam Mendukung Smart City Readiness di Kota Surakarta. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 4(1), 63–73. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2020.4.1.63-73>
- Hidayat, A., & Sofiani, A. (2024). E-Readiness on Application E-Government in Establishing Smart Governance at Bandung City Communication and Information Services Agency. *Journal of Governance*, 9(4), 643–665.
- Hidayat, R. (2016). *Evaluasi Keamanan Informasi Menggunakan Metode Indeks Keamanan Informasi (Kami) (Studi Kasus: Stie Perbanas Surabaya)*. 13.
- Hikmah, A. N., Candradewini, C., & Miradhia, D. (2022). Kesiapan Sumber Daya Manusia Dalam Penerapan Sistem Knowledge Management Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Dki Jakarta. *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 13(2), 291–301. <https://doi.org/10.24198/jane.v13i2.37701>
- Indrajit, R. E. (2016). *Konsep dan Strategi Electronic Government*. Preinexus.

- Indrajit, R. E., Rudianto, D., & Zainuddin, A. (2005). *Electronic Government in Action: Ragam Kasus Implementasi Sukses di Berbagai Belahan Dunia*. Penerbit Andi.
- International Association of Privacy Professionals (IAPP). (2024). *Organizational Digital Governance Report 2024*.
- Irma, N., Ginting, B., Agusmidah, & Leviza, J. (2023). Penerapan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Binjai. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(6), 454–466. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i6.168>
- Israwati, Fadhli, N., & Putri, C. A. (2024). Strategi Pengembangan Kompetensi Pegawai Melalui Teknologi Digital di Kantor Walikota Pekanbaru. *JAMEK (Jurnal Akuntansi Manajemen Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, 04(03), 379–389.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2023). *Laporan Pelaksanaan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023*.
- Kemntrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2024). *Visi Indonesia Digital 2045*. Kominfo RI.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2024). Transformasi Digital Pelayanan Publik & Administrasi Pemerintahan: Akselerasi Transformasi Pemerintahan Digital Melalui Penguatan Kapasitas Tata Kelola & Implementasi. <https://jdih.cirebonkab.go.id/>, diakses pada 02 Januari 2025.
- Kennedy, A., Surya, W. H., & Wartoyo, F. X. (2024). Tantangan dan Solusi Penerapan E-Government di Indonesia. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 4(2), 134–147.
- Kraus, S., Durst, S., Ferreira, J. J., Veiga, P., Kailer, N., & Weinmann, A. (2022). Digital transformation in business and management research: An overview of the current status quo. *International Journal of Information Management*, 63, 1–18. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2021.102466>
- Kuntoro, S., & Suseno, G. (2024). Hambatan dan Solusi dalam Digitalisasi Layanan Publik di Negara Berkembang. *Jurnal Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik,*

- Dan Pemerintahan*, 01(01), 32–48.
<https://journal.syamilahpublishing.com/index.php/mahkamah/article/view/52>
- Lee, J.-S., Tyler, A. R. B., Veinot, T. C., & Yakel, E. (2024). Strengthening the Backbone: Government-Academic Data Collaborations for Crisis Response. *JMIR Public Health and Surveillance*, 10, 1–2. <https://doi.org/10.2196/64726>
- Ma'ruf, M. F., T, T., Kurniawan, B., & Eprilianto, D. F. (2022). Study of E-Readiness: Integration of SDGS Indicators in Village Development Planning in Malo District, Bojonegoro Regency. *SHS Web of Conferences*, 149, 1–8. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202214902033>
- Maghfiroh, N. N. (2023). *Analisis Regulasi dan Implementasi E-Government di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Maisharah. (2024). *Analisis Kesiapan Teknologi Pemerintahan (E-Readiness) dalam Mewujudkan E-Government di Kabupaten Balangan*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Maisyarah, Roziqin, A., Nugroho, R. A., & Te, A. Y. C. (2024). Examining of E-readiness in the Local Government toward Smart City: A Study from Balangan Regency. *Jurnal Ilmu Sosial*, 23(1), 1–24.
- Majapahit, S. A., & Hexagraha, A. (2021). Pengukuran e-Readiness Teknologi Informasi Pada Perangkat Pemerintahan Desa Panyocokan Jawa Barat Dalam Menuju Desa Berteknologi Informasi. *Journal of Information Systems and Informatics*, 3(3), 508–518. <https://doi.org/10.51519/journalisi.v3i3.190>
- Maria, V., Regi, & Hayanti. (2024). Identifikasi Komentar Spam Pada Sosial Media. *Neptunus: Jurnal Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi*, 2(2), 77–91. <https://doi.org/10.61132/neptunus.v2i2.100>
- Maslahah, & Sulistiawati. (2024). Pentingnya Regulasi dalam Mendukung Transformasi Digital di Industri Keuangan (Fintech). *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(6), 315–327.
- Meijer, A., & Bekkers, V. (2015). A metatheory of e-government: Creating some order in a fragmented research field. *Government Information Quarterly*, 32, 237–245. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2015.04.006>
- Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly*, 36, 1–16.

<https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002>

- Milakovich, M. E. (2012). *Digital Governance: New Technologies for Improving Public service and Participation*. Routledge: Taylor & Francis Group.
- Milakovich, M. E. (2022). *Digital Governance: Applying Advanced Technologies to Improve Public Service*. Routledge: Taylor & Francis Group.
<https://doi.org/10.4324/9781003215875>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook 3rd Edition* (3rd Editio). Sage Publications, Inc.
- Miswar, A. P., Abdi, & Wahid, N. (2024). Efektivitas Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mamuju Tengah. *Jurnal Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 5(6), 1229–1241.
- Molobela, T. T. (2023). Assessing the e-readiness of e-government Implementation in South African Municipalities. *Journal of African Films and Diaspora Studies (JAFDIS)*, 6(4), 135–156. <https://doi.org/10.31920/2516-2713/2023/6n4a7>
- Muhammad, F. (2024). *Analisis Kesiapan E-Government dalam Mewujudkan Smart Governance di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
- Munstashir, F. D., & Tricahyono, D. (2021). Analisis Kompetensi Digital Aparatur Sipil Negara di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Bogor (Studi pada Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bogor). *EProceedings of Management*, 8(3), 1–10.
<https://openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id/index.php/management/article/view/14923>
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Press.
- Mutula, S. M., & Brakel, P. van. (2006). An evaluation of e-readiness assessment tools with respect to information access: Towards an integrated information rich tool. *International Journal of Information Management*, 26(3), 212–223.
<https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2006.02.004>
- Nento, F., Nugroho, L. E., & Selo. (2017). Model E-Readiness Untuk Pengukuran

- Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Smart Government : Studi Kasus Pemerintah Provinsi Gorontalo. *Seminar Nasional Inovasi Dan Aplikasi Teknologi Di Industri (SENIATI)*, 3(1), 1–6.
- Nugroho, R. A. (2020). Kajian Analisis Model E-Readiness Dalam Rangka Implementasi E-Government. *Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 11(1), 65. <https://doi.org/10.17933/mti.v11i1.171>
- Nugroho, R. A., & Purbokusumo, Y. (2020). E-Government Readiness: Penilaian Kesiapan Aktor Utama Penerapan E-Government di Indonesia. *Iptek-Kom*, 22(1), 1–17. <https://doi.org/10.33164/iptekkom.22.1.2020.1-17>
- Nurlaila, N., Zuriatin Zuriatin, & Nurhasanah, N. (2024). Transformasi Digital Pelayanan Publik: Tantangan dan Prospek dalam Implementasi E-Government di Kabupaten Bima. *Public Service and Governance Journal*, 5(2), 21–37. <https://doi.org/10.56444/psgj.v5i2.1468>
- OECD. (2024). *OECD Education Policy Perspectives (Digital technologies in career guidance for youth: opportunities and challenges)*.
- Pemerintah Provinsi Lampung. (2022). *Laporan Akhir Penyusunan Peta Rencana SPBE Provinsi Lampung* (Vol. 01). [https://kms.lampungprov.go.id/uploads/files/1/Laporan Akhir Peta Rencana SPBE Provinsi Lampung.pdf](https://kms.lampungprov.go.id/uploads/files/1/Laporan_Akhir_Peta_Rencana_SPBE_Provinsi_Lampung.pdf)
- Priambodo, A. (2023). Dampak Akses dan Infrastruktur, Penggunaan, dan Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Konsumsi Telekomunikasi Rumah Tangga. *JIMEK: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi*, 06(1), 50–71.
- Purwanti, E. (2017). *Analisis Alternatif Kebijakan Data Dan Informasi Jalan Dalam Mendukung Implementasi Program Jakarta Smart City (Studi Di Dinas Bina Marga Provinsi Dki Jakarta)*. Universitas Brawijaya.
- Putra, A. P., & Tefa, G. (2022). Pengembangan Kompetensi Teknologi Informasi Komunikasi Bagi Aparatur Sipil Negara Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bandung. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, 4(1), 14–26. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v4i1.2696>
- Putri, N., & Darmawan, E. (2018). E-Readiness Provinsi Kepulauan Riau dalam Penerapan E-Government (Studi Terhadap Kepri Smart Province). *Kemudi:*

- Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(01), 173–192.
- Samosir, G. (2023). *Kesiapan Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Rangka Menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kabupaten Aceh Tenggara (Studi Kasus di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tenggara)*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
- Samsu. (2021). *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development* (2nd Editio). Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA).
- Saptadi, N. T. S., Sampe, F., & Chyan, P. (2020). Strategi Penerapan Tata Kelola Smart City Dengan Elemen Smart Readiness. *Jurnal Teknologi Industri Dan Rekayasa (JTIR)*, 1(1), 26–33. <https://doi.org/10.53091/jtir.v1i1.1>
- Saputra, A. D., Dione, F., & Uluputty, I. (2023). Pengelolaan Keamanan Informasi dan Persandian di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, 5(2), 159–187. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v5i2.3735>
- Sari, D., Praditya, D., & Takariani, C. S. D. (2019). Kesiapan Daerah Menuju Jawa Barat Smart Province. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 22(2), 105–122. <https://doi.org/10.20422/jpk.v22i2.637>
- Sasoko, D. M. (2022). Pentingnya Perencanaan Dalam Upaya Pencapaian Tujuan Yang Efektif Dan Efisien. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 21(2), 83–89.
- Schneider, G. B. C. (2025). The Importance of Cybersecurity in Digital Government Implementations. *Cognitionis: Revista Cientifica*, 8(1), 1–23.
- Setiawan, A. B. (2015). Studi Kesiapan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Serta Implementasi E-Government dengan Kerangka Kerja Cobit. *Buletin Pos Dan Telekomunikasi*, 9(1), 49. <https://doi.org/10.17933/bpostel.2011.090103>
- Setyawati, D. N., & Fitriati, R. (2023). Digital Governance Dalam Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(1), 48. <https://doi.org/10.31258/jkp.v14i1.8217>
- The SMERU Research Institute. (2024). *Analisis Pengembangan Keterampilan Digital di Sektor Publik Indonesia* (Issue 2).

- Tolandang, M. F., Gosal, R., & Pangemanan, S. E. (2022). Efektivitas Organisasi Dinas Informasi Komunikasi Statistik Dan Persandian Dalam Pemanfaatan E-Government Di Kabupaten Minahasa Tenggara Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Organisasi Dinas Komunikasi I. *Jurnal Governance*, 2(1), 1–15. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/39894>
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/download/39894/35886>
- Ulya, Y. A. (2020). *Pengukuran E-Readiness Menggunakan Framework STOPE pada Proses Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Kota Surabaya*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Utomo, C. E. W., & Hariadi, M. (2016). Strategi Pembangunan Smart City dan Tantangannya bagi Masyarakat Kota. *Jurnal Strategi Dan Bisnis*, 4(2), 159–176.
- Verhoest, K., Hammerschmid, G., Rykkja, L. H., & Klijn, E. H. (2024). *Collaborating for Digital Transformation: How Internal and External Collaboration can Contribute to Innovate Public Service Delivery*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781803923895>
- Waheduzzaman, W., & Miah, S. J. (2015). Readiness assessment of e-government: a developing country perspective. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 9(4), 1–20. <https://doi.org/10.1108/TG-05-2014-0018>
- Welchman, L. (2015). *Managing Chaos: Digital Governance by Design*. Rosenfeld Media.
- Wicaksono, S. R. (2023). *Konsep Dasar E-Government*. CV. Seribu Bintang. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8004026>
- Widodo, J., & Kusnan, K. (2023). Pemetaan dan Analisis Sentimen E-Government pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Society*, 11(2), 456–481. <https://doi.org/10.33019/society.v11i2.558>
- Wijaya, A., & Saleh, M. (2025). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance pada Pemerintahan Daerah. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, Dan Politik*, 5(3), 2154–2164.
- Wiranti, N. E., & Frinaldi, A. (2023). Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik

dengan Teknologi di Era Digital. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(2), 748–754. <http://jim.unsyiah.ac.id/sejarah/mm>

World Bank. (2022). *Digital Government Readiness Assessment (DGRA) toolkit*.

[Www.Worldbank.Org](http://www.worldbank.org).

<https://www.worldbank.org/en/data/interactive/2022/08/22/digital->

[government-readiness-assessment-dgra-toolkit](https://www.worldbank.org/en/data/interactive/2022/08/22/digital-government-readiness-assessment-dgra-toolkit)

Younus, M., Suswanta, & Zaenuri, M. (2023). Public-Private Collaboration to

Overcome the Digital Divide in Digital Transformation of Government. *Jurnal*

Teknologi Informasi Dan Komunikasi, 15(1), 28–41.

<https://doi.org/10.31849/digitalzone.v15i1.17027>

Zubaidah, E., Monalisa, M., Rusadi, S., & Handoko, T. (2024). E-Readiness

Analysis to Accelerate Transformation Towards E-Government in Regional

Government in Indonesia: Case Study of the Government of Indragiri Hulu

Regency of Riau Province. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs*

Governance, 16(1), 37–53. <https://doi.org/10.21787/jbp.16.2024.37-53>